



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI  
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SERTA PERUM BULOG**

---

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Dengan	:	Dirjen Holtikultura, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; serta Dirut Perum Bulog.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 29 Mei 2019
Waktu	:	10.00 WIB s.d. selesai
Acara	:	Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI.
Ketua Rapat	:	Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	17 dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir Mitra Kerja	:	Dirjen Holtikultura, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; serta Dirut Perum Bulog.

**ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:**

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. SUDIN
7. Ir. MINDO SIANIPAR

8. Ir. EFFENDI SIANIPAR
9. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
10. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
11. Ir. EDDY KUNTADI
12. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
13. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
14. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
15. Drs. H. UMAR ARSAL
16. M. IRWAM ZULFIKAR, M.B.A.
17. Hj. KASRIAH

**ANGGOTA YANG IJIN:**

1. Drs. I MADE URIP, M.Si.
2. ONO SURONO, S.T.
3. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
4. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
5. RIDWAN ANDI WITTIRI
6. Ir. TAGORE ABUBAKAR
7. DJENRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
8. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
9. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
10. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
11. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
12. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
13. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
14. dr. FELLICITAS TALLULEMBANG
15. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
16. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
17. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
18. Drs. H. IBNU MULTAZAM
19. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
20. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
21. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
22. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
23. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
24. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
25. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
26. Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.
27. Drs. FADHOLI
28. SULAEMAN L. HAMZAH
29. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
30. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (VIVA YOGA MAULADI, M.Si.):**

***Bissmillahirrohmanirrohim***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya,  
Shalom Om swastiastu,  
Namo Budhaya.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI,  
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pertahanan Pangan,  
Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan,  
Dirjen Tanaman Pangan,  
Dirjen Kortikultura,  
Dijren Pertanian,  
Yang terhormat Saudara Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,  
Dirjen Perdagangan Luar negeri,  
Kementerian Perdagangan,  
Yang terhormat Direktur Perum Bulog, serta  
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita ucapkan Puji Syukur Kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya dan hidayahnya, pada siang hari ini kita mengadakan RPD dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebelum dilanjutkan, perkenankan kami mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan bagi yang berpuasa, Pak Sudin juga berpuasa. Semoga alam ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Sesuai dengan jadwal rapat DPR-RI Masa Persidangan ke-V Tahun Sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rabat Bamus DPR-RI, tanggal 20 Maret 2019 dan sesuai keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 14 Mei 2019, pada Hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Komisi IV DPR-RI menyelenggarakan RPD membahas tindak lanjut hasil Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR-RI.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV, ditandatangani oleh 10 dari 6 Fraksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251, Tatib DPR, rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)**

Jadi kita tunda dulu, berapa menit, 4 menit, 5 menit. 5 menit ya, 3 menit saja soalnya ini angka tidak menentukan sudah selesai pemilu. Kita skors 3 menit, setelah itu kita akan lanjutkan lagi.

**Rapat diskors.**

**(RAPAT: SETUJU)**

**Skors dicabut.**

RDP hari ini dimulai Pukul 11.00 sudah molor, Jam 12, diakhiri Pukul 13.00 atau Pukul 14.00. Apabila belum selesai rapat, dilanjutkan sesuai Pasal 226 Ayat (1), Tati DPR-RI dan atau sesuai kesepakatan bersama. Adapun untuk acara rapat pada siang hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar rapat,
2. Penyelesaian Eselon I, dimulai dari Kementerian Pertanian dulu, kemudian Eselon I, Kementerian Perdagangan dan dari Perum Bulog. Membahas tindaklanjut hasil kunjungan spesifik Komisi IV DPR-RI.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban antas Komisi IV,
5. Kesimpulan rapat, keputusan rapat,
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dalam disetujui?

Kalau tidak ada yang protes, berarti setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak-Ibu yang kami hormati.**

Dari Kementerian Pertanian ada Bapak Agung Hendriyadi, ada Bapak Suwandi Dirjen Horti dan Kepala Badan Tanaman Pangan. Pak Ketut dari Bali. Pak Gatot diwakili. Dari Kemendag, Ibu Tjahya Widjayanti, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Bapak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dari Perum Bulog ada Pak Bgya Mulyanto, Direktur SDEM dan Umum, ada Ibu Judith J. Dipodiputro.

**Bapak-Ibu yang kami hormati.**

Rapat Dengar Pendapat hari ini merupakan tindaklanjut hasil kunjungan spesifik Komisi IV DPR-RI, dalam rangka peninjauan ketersediaan dan harga pangan saat menjelang Ramadhan menjelang hari raya. Pada tanggal 21 Mei kemarin ke Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Bali. Ada tiga tim yang berkunjung untuk mengecek kondisi di lapangan. Bahwa ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, hal yang menjadi perhatian Komisi IV adalah masalah ketercukupan, ketersediaan, keterjangkauan baik akses maupun ekonomi serta keamanan pangan. Temuan dan poin yang akan diangkat dalam kunjungan yang lalu yaitu, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pelaku usaha yang melakukan, penimbunan bahan pangan pokok karena dibeberapa kasus di lapangan itu masih.

Kemudian termasuk di dalamnya pelaku usaha yang menaikkan harga dan yang menghambat distribusi pangan guna mengambil keuntungan hari raya besar keagamaan. Kenaikan harga ini ada yang norma, ada yang tidak normal. Memang setiap tahun selalu ada kenaikan harga. Disamping itu poin lain yang diangkat dalam diskusi adalah bagaimana upaya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan lokal, baik disektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Langkah strategis tersebut yaitu dengan menyerap hasil pertanian atau bahan pangan lokal atau distribusi pangan, sehingga petani, peternak, lokal sebagai produsen serta masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan, baik dari sisi harga maupun pasokan.

Hal lain yang menjadi perhatian kami adalah sejauh mana pelaksanaan hasil keputusan Rakortas Bulan Maret 2019, mengenai importasi bawang putih yang menunjuk Perum Bulog sebagai pelaksananya. Nah ini agak ramai ini, nanti bisa dijelaskan oleh Kemendag.

### **Hadirin yang berbahagia.**

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan dari pemerintah untuk memberikan penjelasan, waktu tidak dibatasi tergantung dari pemerintah, kalau cepat nanti selesai rapatnya juga cepat, kalau lama nanti selesai rapatnya setelah berbuka puasa.

Kami persilakan kepada pemerintah.

Dari Pertanian dulu, kemudian dari Kemendag dan selanjutnya dari Bulog.  
Kami persilakan Pak Agung.

### **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

*Assalamualaikum Warrmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IV Anggota Dewan,  
Yang terhormat Bapak dari Eselon I dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Direksi dari Bulog.**

Pertama-tama tentu kami ucapkan Selamat Menuaikan Ibadah Puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

### **Bapak Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.**

Kami ingin sampaikan Pak, mengenai hasil kunjungan khususnya adalah kondisi terkini mengenai perkembangan ketersediaan, baik neraca maupun harga. Jadi bahan pangan pokok kita dan sebagaimana mungkin adalah hasil kunjungan kita pada saat kunjungan ke anggota Komisi IV, Pimpinan dan Anggota Komisi IV ke Sumatera Selatan, kemudian Jawa Timur dan Bali.

Yang pertama mungkin langsung ke nomor 4. Yang nomor 4 ini yang kebetulan kami coba susun kembali necara Januari-Juni. Ini sebenarnya ada sedikit perubahan dari kita melihat perkembangan perbulannya, sehingga setiap bulan kita melakukan updating. Jadi kalau ini sudah akhir Mei, ini mudah-mudahan updating terakhir untuk bulan Juni. Disana terlihat memang hampir semua kebutuhan bahan pokok kita dari sisi ketersediannya mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan, walaupun memang sebagian memang kita masih mengandalkan pasokan dari impor, seperti misalnya kedelai kemudian bawang putih dan juga daging sapi, kerbau. Tapi semuanya sudah kita antisipasi bersama dengan yang stok yang ada di Bulog dan juga kawan-kawan dari Kementerian Perdagangan, sehingga kebutuhan sampai dengan akhir Juni ini bisa. Itu yang pertama Pak Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Yang kedua lanjut saja.

Seperti biasanya kami juga melakukan juga monitoring menyakinkan bahwa pasokan cukup ini menggunakan parameter di DKI Pak, ini di Pasar Induk beras Cipinang. Pasokan kita tanggal 26 Mei, 47.256. Ini hampir dua kali lipat dari normal. artinya apa, bahwa sebagai parameter nasional, PIBC kita bisa memasok bahwa ini mencukupi secara nasional. Kemudian untuk yang komunitas lain, kita melihat di

Pasar Induk Kramat Jati. Pasokan untuk cabe rawit, bawang merah dan cabe merah keriting memenuhi hanya sedikit perubahan ada kekurangan pada saat itu adalah awalnya bawang putih. Tapi bawang putih RIPH yang terakhir, SPI yang terakhir 115 ribu ton sudah terdistribusikan, sehingga pasokan ke pasar-pasar juga sudah termain, begitu juga pasokan ke beberapa daerah. Ini terbukti dengan kemarin kunjungan pimpinan dan anggota Komisi IV ke 33 provinsi, kita melihat harga, harga sudah mendekati 35 ribu. Ini yang juga kita inginkan. Tetapi tentu kita juga mencermati, begini Bapak pimpinan dan anggota. SBI yang kami terbitkan kemarin baru 115 ribu ton. 115 ribu ton ini kira-kira cukup untuk dua bulan setengah, kalau itu dimulai bulan Mei, berarti akhir Juni kita harus hati-hati bahwa akan memasuki bulan Juli takutnya ada kelangkaan lagi, sehingga ini akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga. Nanti mungkin Pak Dirjen Horti dan Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri bisa menyampaikan rencana selanjutnya seperti apa terkait dengan bawang putih.

Ini adalah peta produksi kita pada Bulan Juni, untuk padi saya rasa aman Pak, karena perencanaan produksi kita mencapai 7,2 juta ton.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

##### **Interupsi.**

Pak Agung, tadi Bapak menampilkan DKI, hanya menampilkan Pasar Induk. Bapak lihat seberapa banyak, berapa juta orang mudik. Berarti DKI konsumsinya berkurang Pak. Yang dikhawatirkan itu, di luar wilayah DKI juga Pasar Induk stabil ia karena konsumsinya pasti kurang, diperkirakan oleh pemerintah data terakhir 1,2 juta orang keluar dari Jakarta. Jadi nanti tolong ditampilkan juga diluar Jakarta.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Siap Pak Sudin.

Nanti terkait dengan beberapa kondisi Pasar Induk di daerah, Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan menyampaikan.

Saya lanjutkan mengenai produksi Pak. Untuk Juni ini ada sekitar 7,2 ton GKG, kemudian kemarin waktu kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mengingatkan kembali kepada Bulog Pak, untuk melakukan penyerapan agar mengendalikan harga termask juga untuk cadangan pangan pemerintah. Juga suda kita di dalam laporan, tentunya di dalam hasil kunjungan Pimpinan Komisi IV.

Untuk produksi cabe besar, ini alhamdulillah untuk cabe dan bawang merah Bapak-Ibu sekalian, ini Mei, Juni panen besar. Sekali lagi ini juga diingatkan kemarin oleh para Pimpinan dan Anggota Komisi IV pada saat kunker, untuk bagaimana Bulog tidak hanya bekerja untuk beras, tetapi juga dengan cabe dan juga bawang merah. Kami tadi pagi sudah diskusikan dengan Bulog Pak, kemungkinan beberapa akan kita tingkatkan penyerapan untuk bawang merah misalnya di Brebes kita sudah punya cas, walaupun performance belum bekerja dengan baik. Ini laporan dari Bulog. Tapi kita upayakan. Kemudian di beberapa tempat termasuk salah satunya di Solo, Pak Wandu, ini kita akan juga upayakan untuk bisa kendalikan harga khususnya untuk bawang. Cabe sendiri juga demikian, karena ini kekhawatiran kita adalah sekarang ini Bulan Juni memasuki panen besar Pak, kemarin sudah terbukti di daerah Tuban ini harga sampai Rp.3000/kg, kami sudah bekerja sama dengan Bulog mengangkat harga disana dengan cara kita membeli dengan harga Rp.8000, dan akhirnya bisa

kembali keharga 8 ribu Pak, bahkan sampai 10 ribu hari ini. Ini tentu hal seperti harus kita lakukan.

Baik, selanjutnya mengenai perkembangan harga. Kemarin kita juga sudah melakukan beberapa termasuk di dalamnya adalah di 3 provinsi. Beras Premium dan Beras Medium saya rasa tidak ada perubahan hampir stabil selama Bulan Ramadhan, Insya Allah menjelang Idul Fitri juga demikian. Ini rata-rata nasional Pak. Kemudian rata-rata 3 provinsi, kemudian untuk bawang merah dan bawang putih, ini juga demikian. Bawang merah ini Sumatera Selatan ini paling murah 23 ribu, kemudian yang paling mahal masih ada di Bali. Kemudian untuk bawang putih ini Jawa Timur paling murah 27 ribu, bahkan kemari Pak Menteri sampai 19 ribu. Kemudian di tertinggi masih di Sumatera Selatan.

Perkembangan harga. Terkait dengan masih 3 provinsi, ini cabe merah keriting dan cabe rawit merah harganya juga relatif stabil untuk ke tiga provinsi. Begitu juga mengenai 3 provinsi juga untuk daging ayam, ras dan daging sapi. Ini juga tidak mengalami perubahan, hampir stabil selama bulan ramadhan. Insya Allah untuk daging ayam dan telur ayam Pak, mudah-mudahan kita prediksi akan ada peningkatan 10-20% Pak. Tapi kita sudah hadapi antisipasi untuk keduanya produksi kita pada bulan ini menjadi hampir naik sekitar 20%-30%.

Kemudian untuk yang lain gula pasir dan minyak goreng, saya rasa hampir stabil selama bulan ramadhan Insya Allah kita bisa jaga sampai Idul Fitri nanti.

### **Bapak-Ibu sekalian.**

Yang paling terakhir, kami ingin sampaikan kesimpulan apa yang kemarin kunjungan Pimpinan dan Anggota, berikut tindaklanjut yang akan kita lakukan. Yang pertama secara keseluruhan pasokan pangan di tiga provinsi, kunker spesifik Sumatera Selatan, Jatim, Bali stabil dan aman pada Bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri. Disarankan instansi terkait agar melakukan koordinasi dan pengawalan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. Kami sudah sampaikan kepala dinas pangan diseluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan dinas pertanian, dinas perdagangan dan juga satgas pangan secara bersama-sama melakukan koordinasi pengawasan mengenai pasokan dan harga bahan pangan pokok harian.

Yang kedua, beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabe merah sudah mulai panen, sudah kami laporkan tadi Pak, tapi memang yang harus kita cermati sekarang adalah kekhawatiran kita harga akan jatuh. Oleh karena kami juga kerja sama dengan Bulog menyampaikan ini dengan potensi-potensi panen di provinsi, termasuk upaya-upaya apa yang kita lakukan diantaranya adalah mengoptimalkan kontrol system stored bawang merah yang ada di Brebes ini kita siapkan.

Kemudian yang ketiga mengenai produksi bawang putih, memang masih belum mencukupi, seperti kami laporkan juga, bahwa ada 115 ribu ton yang telah kita impor, kemudian ada kebutuhan dua setengah bulan, nanti distribusinya seperti apa di pasar-pasar induk dan sebagainya, termasuk pasokan komoditas lain, nanti Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemdag dan Pak Dirjen Horti akan menyampaikan.

Yang keempat, pemerintah disarankan melakukan pengawasan menindak tegas para pelaku usaha yang melanggar kelancaran distribusi. Alhamdulillah selama kunker kemarin, hadir juga kepala dinas perdagangan dimasing-masing provinsi. Nah

tentu ini ada kaitannya tupoksi dari pada kementerian perdagangan terhadap kelancaran distribusi, serta menghindari terjadinya penimbunan yang menyebabkan harga stabil.

Yang kelima, disarankan pemerintah harus mempunyai terobosan untuk menyerap dan membeli gabah petani. Tadi sudah kami diskusikan. Ada potensi panen 7 juta ton, gabah kering giling Bulan Juni untuk bisa kita serap, kalau target kita sekitar 10%, 8-10% Pak. Jadi kalau sampai dengan akhir Mei ini, hari ini total serapan Bulog ada 600 ribu ton, target kita sampai dengan akhir Juni, kita punya kemampuan bisa menyerap sampai 1 juta ton. Ini yang menjadi badan kita.

Kemudian yang terakhir, sarankan juga pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap keamanan dan membuat standar kelayakan. Kami sampaikan Pak pimpinan dan anggota, bahwa untuk keamanan pangan yang menjadi tupoksi kami adalah pangan segar asal tumbuhan dan hewan. Sedangkan olahan ada di BPOM. Nah kami juga sudah siapkan, jadi di setiap provinsi kami ada yang namanya Otoritas Keamanan Pangan yang ada di bawah dinas ketahanan pangan, ini kita lengkapi dengan SDM dan juga peralatannya untuk melakukan pengawasan, tapi khususnya adalah pangan segar asal tumbuhan dan hewan, di luar itu, itu menjadi wewenang dari BPOM.

**Pak Ketua serta Pimpinan Komisi IV dan Anggota yang saya hormati.**

Itu yang bisa kami sampaikan, tentu nanti sebaliknya dalam diskusi, saya mengharapkan Pak Dirjen yang terkait bisa memberikan penjelasan-penjelasan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Wandu, sudah cukup yang dari Pertanian. Oke cukup. Silakan dari Kementerian Perdagangan.

**DIRJEN KEMENDAG:**

***Bismillahirrohmanirrohim***

**Yang kami hormati Bapak ketua dan Wakil ketua Komisi IV,  
Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV,  
Bapak-Ibu Eselon I dan Direksi Perum Bulog,**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas undangan dari yang terhormat Komisi IV DPR-RI, untuk melakukan pertemuan pada hari ini untuk membahas hal yang terkait dengan kebijakan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dalam menghadapi Hari Raya, dan juga dikaitkan dengan hasil kunjungan yang kemarin.

**Bapak Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi IV yang kami hormati.**



Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan telah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok, terutama pada Bulan Puasa dan Lebaran dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada tahun 2017 dan 2018 dan mudah-mudahan di tahun 2019 ini juga kita akan bisa menjaga apa harga dan nantinya berdampak terhadap inflasi.

Hal ini tergambar dari tingkat inflasi, baik inflasi umum maupun bahan makanan yang semakin turun. Inflasi umum di Bulan Puasa turun selama 3 tahun berturut-turut dari 2016 sebesar 0,66% menjadi 0,39% di tahun 2017 dan turun kembali menjadi 0,21% di tahun 2018. Sementara momen lebaran tahun 2017 dan 2018, inflasi umum stabil di 0,69% dan turun menjadi 0,59% di tahun 2018.

Keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas kebutuhan pokok tersebut tidak terlepas dari stabilitas yang dijalankan yaitu penguatan regulasi melalui Permendag. Terkait dengan harga acuan, harga eceran tertinggi, harga khusus pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, penataan dan pembinaan gudang dan pencantuman lebe beras, pemantauan dan pengawasan harga, ketersediaan barang pokok, kebutuhan ini.

### **Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati.**

Dalam rangka pengawasan barang kebutuhan pokok di bulan puasa dan lebaran ini, kami dibantu oleh teman-teman Eselon I dan jajaran Kementerian Perdagangan dan juga suport oleh pemerintah provinsi dan kabupten/kota serta pengawasan oleh satgas pangan diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian kami juga melakukan penatalaksanaan dnegan menjalan koordinasi dengan pemerintahan daerah, instansi terkait dan pelaku usaha. Kemudian melakukan fasilitasi juga oleh BUMN dan para pelakuk usaha dan penugasan Perum Bulog serta upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar kepasar rakyat melalui pengawalan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran.

Dapat kami sampaikan Bapak-Ibu yang terhormat. Bahwa saat ini kemarin Hari Senin telah dilakukan pelepasan sekitar 240 staf dari kementerian perdagangan untuk turun ke daerah. Mereka mulai hadir di daerah pertanggal 27 Mei sampai dengan H-1 lebaran. Mereka baru kembali lagi ke Jakarta untuk melakukan pengawalan terhadap kondisi pergerakan harga dan kondisi stok di daerah. Nah inilah yang merupakan upaya kami di hari-hari terakhir menjelang lebaran.

Untuk menjaga pencapaian ini di tahun 2019 terutama pada moment puasa dan lebaran, kementerian perdagangan dapat menyampaikan lebih rinci lagi kegiatan-kegiatan utama yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pemantauan dan pengawasan dengan melaksanakan rapat koordinasi daerah yang dihadiri oleh 34 kepala dinas yang membidangi perdagangan. Pada tanggal 20 Maret 2019 yang kami lakukan di Bandung. Kemudian kami juga melakukan upaya khusus penetrasi pasar. Kemudian stabilisasi harga pasokan dan barang kebutuhan pokok.

### **Bapak-Ibu yang kami hormati.**

Bahawa dalam rapat koordinasi barang kebutuhan pokok menjelang puasa tahun 2019 waktu itu, dan ini tentu saja dilanjutkan dengan rapat koordinasi di daerah di 34 provinsi. Ini kami lakukan dari tahun ketahun setiap tahun 2017. Kami melakukan rapat koordinasi ini di 34 provinsi dan kami juga melakukan pemantauan langsung kepasar-pasar rakyat, ritel modern, gudang-gudang distributor, gudang bulog yang kami lakukan untuk tahun 2019 ini sejak tanggal 10 April hingga tanggal 1 Mei 2019.

Hasil dari rapat koordinasi dan turun kelapangan pada periode tersebut, menunjukkan bahwa kondisi stok secara umum dan juga harga terkendali.

### **Bapak dan Ibu yang kami hormati.**

Khususnya untuk di gudang Bulog, kami dapat sampaikan bahwa beberapa komoditi seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran pada saat lebaran nanti. Kemudian upaya yang kedua yang kami lakukan adalah penetrasi pasar barang kebutuhan pokok menjelang lebaran 2019 ini atau 1440 H. Untuk melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat pantauan secara harian, ada sekitar 205 pasar pantauan yang kami awasi dan cermati dari hari kehari. Jadi kami mempunyai harga ditingkat eceran setiap harinya 205 pasar dan melakukan koordinasi pemenuhan pasokan ke pasar apabila diperlukan. Kementerian Perdagangan menurunkan tim yang tadi sudah kami sampaikan ke pasar rakyat di 34 provinsi, 82 kabupaten/kota, 205 pasar bekerja sama dengan dinas perdagangan provinsi dan kabupaten/kota, satgas pangan daerah. Bulog devisi regional atau sub devisi regional serta para distributor barang kebutuhan pokok di wilayah setempat. Dengan menurunkan tim dari pusat secara langsung, maka pengawalan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah dalam rangka menjaga kecukupan pasokan sebagai antisipasi naiknya permintaan menjelang lebaran, dapat kami laksanakan dengan cepat dan diharapkan tidak akan mengganggu stabilitas harga.

Selain itu juga berdasarkan data harga yang dikeluarkan oleh BPS hingga minggu keempat Bulan Mei. Terhadap beberapa komoditi yang harganya naik dibandingkan dengan Bulan April tahun 2019, sehingga belum mendapatkan perhatian lebih menjelang lebaran, seperti bawang putih yang waktu itu kami hitung naiknya sekitar 28%. Kemudian cabe merah, cabe rawit naik sekitar 24% dan 9,86%. Serta daging dan telur ayam yang naik masing-masing sekitar 7-2%. Tentu saya hal ini perlu waspada terutama daging ayam dan telur ayam, yang permintaannya terus meningkat sejak menjelang Bulan Puasa sampai tentu saja pada saat menjelang lebaran nanti. Beberapa memang apa permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok seperti daging dan ayam mengalami peningkatan.

### **Bapak-Ibu Anggota Komisi IV dan Pimpinan yang kami hormati.**

Dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, kami juga melakukan upaya melingkupnya tidak dibatasi oleh moment puasa dan lebaran saja. Dengan pemantauan harga yang rutin dari hari kehari, apabila harga di pasar telah melebihi eceran tertinggi untuk beberapa komoditi kami terapkan harga eceran tertinggi maupun harga acuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 96 tahun 2018. Kami berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk kita bisa menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan untuk beberapa komoditi yang memang mengalami lonjakan harga atau perubahan harga karena adanya permintaan.

### **Bapak-Ibu yang kami hormati.**

Untuk menjaga kecukupan pasokan beras yang ini merupakan bahan pokok masyarakat. Kami telah mengirimkan sura kepada Perum Bulog pada tanggal 2 Januari 2019 lalu, untuk melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, yang kami singkat dengan KPSH atau yang biasa kita kenal operasi pasar beras

medium. Hingga tanggal 23 Mei 2019, Bulog telah menyalurkan sekitar 221.474,36 ton beras medium, yang setara dengan 2356,11 ton/harinya. Stok Bulog pertanggal 30 Mei data yang kami punya masih sebesar 2.177.625 ton yang terdiri dari stok cadangan beras pemerintah atau CBP sekitar 2.030 ton 628 ton dan stok komersial sekitar 146.997 ton. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi dengan importir bawang putih. Kalau tadi disebutkan juga pada tanggal 16 April 2019 lalu dan meminta mereka melakukan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau operasi bawang putih dengan harga jual ditingkat grosir 20 ribu/kg dan ditingkat konsumen maksimal 30 ribu/kg. Melalui jaringan distributor masing-masing pelaku usaha importir. Jadi bawang putih yang sudah diimpor oleh importir ini tidak masuk gudang.

#### **Bapak-Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati.**

Pada saat kami melakukan operasi pasar pada tanggal 18 April, kami menggunakan stok bawang putih dari para importir yang merupakan impor tahun 2018. Impor pertama kali masuk pada tanggal 2 Mei 2019. Mungkin untuk impor nanti bisa ditambah oleh Bapak Dirjen.

Sejak KPSH tanggal 18 April sampai dengan 15 Mei 2019 lalu, telah didistribusikan sebesar 400,8 ton di 13 provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Timur. Namun demikian KPSH yang sudah dilakukan ini dapat kami laporkan tidak serta merta bisa menurunkan harga bawang putih. Setelah itu kami lakukan bukan perubahan mekanisme dari KPSH ini. Kami lakukan KPSH ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dengan menggunakan instrumen pasar ritel modern. Kami meminta kepada ritel modern untuk menjualnya seharga 35 ribu perkilo dan itu dimulai pada tanggal 10 Mei 2019. Kami minta kepada Aprindo untuk melaksanakan ketentuan ini sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2019. Upaya stabilisasi harga ini, terlihat bahwa sejak tanggal 8 Mei itu sudah mulai terlihat harga bawang putih mengalami penurunan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati, serta para Pimpinan Komisi IV.

Berdasarkan rapat koordinasi kami pada tanggal 10 Mei 2019, mohon maaf. Kami langkapi lagi yang tadi kami sampaikan bahwa kami meminta kepada Aprindo untuk melakukan operasi pasar atau KPSH, dengan harga pembelian ditingkat gudang importir seharga 20/kg, kemudian dijual dengan harga 35 ribu/kg. Dan ini sudah termasuk 8%. Jadi tidak ada lagi biaya-biaya yang lainnya, sehingga tidak meningkatkan harga ditingkat ritel modern.

Kemudian untuk ayam ras. Mekanisme penyaluran ayam ras ini akan kami lakukan secara hampir sama dengan bawang putih, karena di beberapa daerah contohnya Jawa Tengah. Harga di Jawa itu masih dibawah harga acuan yang tertuang di dalam Permendag nomor 96. Jadi kami gunakan mekanisme ritel modern untuk mereka menyerap ayam-ayam ini yang setelah dipotong oleh ARPHUIN (Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas). Jadi kami tentukan harga sekitar 18 ribu/kg. Itu yang diserap oleh ARPHUIN. Kemudian dijual nanti oleh ARPHUIN pada tataran harga sekitar 32-33 dan nanti dijual ditingkat konsumen sekitar 34 ribu/kg.

Bapak-Ibu.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi IV yang telah

mensupport Kementerian Pertanian untuk tetap melakukan produksi untuk bisa menjaga ketersediaan pasokan, terutama untuk barang kebutuhan pokok.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ibu nanti bahannya kami minta ya, karena kebiasaan di Komisi IV itu, setiap presentasi itu, kita dari anggota juga harus punya itu bu, tapi tidak apa-apalah, ini karena bulan puasa tidak boleh marah-marah.

Silakan dari Bulog, Ibu Judin.

#### **DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH JUBILINA DIPODIPUTRO ):**

Selamat Siang.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Komisi IV yang terhormat,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,  
Bapak dan Ibu Pejabat dari Kementerian Perdagangan, dan  
Bapak dan Ibu Pejabat dari Kementerian Pertanian,**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasi atas undangan dan kesempatan kami yang diberikan kepada kami untuk kami pada pertemuan ini. Kami mohon maaf bahwa Direktur Utama kami tidak bisa hadir dan mewakili kepada kami berdua, Bapak Direktorat SDM dan Umum, serta kami sendiri.

Paparan kami ini adalah update dari paparan yang telah kami lakukan pada tanggal 15 Mei lalu, 14 hari yang lalu, dua minggu yang lalu, terkait upaya Bulog untuk turut menjaga stabilitas harga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok yang menjadi tugas Bulog, khususnya terkait Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Seperti yang telah kami sampaikan, Perum Bulog bekerja sangat keras untuk terus dapat melakukan pengadaan secara tepat waktu guna menjaga stabilitas harga. Disini kami sampaikan kembali bahwa untuk sampai saat ini realisasi pengadaan gula pasir 13.129 ribu ton, jagung 205.758 ton, dalam negeri 1463 ton, 8 dari masyarkaat, luar negeri 204.295 ton. Daging kerbau 15.092 ton, bawang saat ini 8400.32 ton dan khususnya adalah penyerapan beras khususnya dari masyarakat dalam negeri tahun ini Pak seluruhnya kita lakukan dari dalam negeri telah mencapai 505.367 ton. Terkait penyaluran yang adalah penugasan sampai per 24 Mei, Basos Rastra tersalurkan 246.420 ton, golongan anggaran 35.623 ton, KPSH 221.903 ton dan untuk bantuan bencana alam 1447 ton.

Selanjutnya terkait ketersediaan maupun persediaan yang masih ada di Perum Bulog maupun yang telah kami salurkan kepada jaringan-jaringan distribusi Bulog. Untuk beras saat ini melengkapi penjelasan dari Ibu Dirjen Perdagangan, kami telah menambah lagi. Saat ini stok Bulog ada 2.199.363 ton. Dimana telah disalurkan melalui pada jaringan 746 ton. Jagung bulog saat ini stok adalah 83.286 ton sedangkan jejaringan 14.343 ton. Gula 23.116 ton, dimana dijaringan ada 2737 ton. Daging 4759 ton ada di Bulog, ada pada jaringan sudah kami salurkan dalam kurun waktu 16-27Mei, tambahan dari sebelumnya 1675 ton. Tepung terigu tidak ada perubahan tetap stok kami ada 226 ton, minyak goreng 950.597 liter, bawang merah

hanya 35 ton, bawang putih 9 ton, telur ayam 15 ton. Namun perlu kami sampaikan bahwa kami terus melakukan pengadaan lokal dan langsung penjualan lokal. Dan itu tentunya juga terkait harga yang jauh lebih baik bagi masyarakat dan juga barang lebih dipreferensi masyarakat.

Terkait dengan daging perlu kami tambahkan, bahwa kami perikaraan stok untuk Mei sampai Juli adalah 12.767 ton, dimana rencana kedatangan untuk Mei dan Juli adalah sekitar 8008 ton.

### **Mohon ijin Bapak Pimpinan Ketua Komisi dan Bapak Wakil ketua.**

Sekaligus kami ingin menyampaikan beberapa yang kami mohon, sekali lagi menjadi perhatian dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertama mengenai beras, seperti telah diketahui stok beras Bulog amat sangat melimpah dan terus terang membenai Perum Bulog secara finansial. Untuk itu kami ada 4 hal yang kami mohon sekali lagi mohon bantuannya, yaitu perlu tidak lanjut hasil Ratas 3 Mei, point 4 yaitu perlu pembaharuan kebijakan harga pembelian pemerintah yang belum berubah sejak tahun 2015, sehingga menyulitkan kami dalam penyaluran. Yang kedua, berdasarkan surat Mendagri nomor 2, Endagsd/1/2019 tertanggal 2 Januari. Kegiatan KPSH dilaksanakan sampai tanggal 31 Mei 2019. Untuk itu kami mohon kiranya KPSH perlu diperpanjang pada bulan Juni ada hari-hari besar keagamaan nasional.

Point yang ketiga adalah kebijakan ijin pengeluaran beras secara out untuk beras CBP. Saat ini Bulog mengelola atas nama pemerintah 1,5 juta ton. Beras itu usianya sudah cukup lama melampaui satu tahun. Sementara penyerapan dari masyarakat kami, saat ini sangat aktif dan kualitas berasnya pun merupakan preferensi masyarakat. Sehingga kami mohon juga dapat diputuskan dapat diberikan masukan, agar beras lama bisa kami keluarkan yang saat ini adalah CBP dan penggantian CBP itu dilakukan dengan beras penyerapan baru. Insya Allah kualitasnya tentu masih sangat pres.

Yang keempat, yang saat memang sedang bergulir. Sekali lagi kami mohon dukungan adalah agar stok Bulog dapat digunakan untuk keperluan BPNT, kartu sembako dan penyaluran kepada Sipil Negara dan TNI dan Polri. Point kedua yang juga cukup penting, terkait dengan stabilisasi harga, tetapi ini juga merupakan dari Bulog sendiri dimana kami untuk melengkapi beban kami di beras, yaitu dalam rangka penyediaan cadangan gula, kami menilai penting penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan penyerapan gula petani produksi musim giling 2019, yang harga jualnya ditetapkan pemerintah. Untuk memudahkan pengawasan pemerintah terhadap distribusi gula kristal putih, hasil olah sugar dan diimpor dan diolah oleh pabrik swasta maupun pabrik gula BUMN, maka hasil olah sugar tersebut didistribusikan hanya oleh Perum Bulog. Ini mohon dapat kiranya dipertimbangkan, agar distribusi tersebut hanya melalui Perum Bulog dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga apabila terjadi kerugian akibat penugasan tersebut, maka Perum Bulog dapat menagih biaya yang timbul melalui CSHP. Namun sejauh ini Pak, yang kami perhatikan bahwa penjualan gula sangat baik dan Insya Allah tidak terlalu membebani pada CSHP.

Sekali lagi Pak, mohon dukungannya.

Berikutnya adalah kami ingin mohon doa restu, sekaligus juga dukungan. Terkait apakah Perum Bulog siap untuk melaksanakan BPTN. Saat ini kesiapan stok kami memiliki pasokan beras yang tadi kami sampaikan amat besar, 2,19 juta ton dan 900 ribu ton diantaranya merupakan beras premium. Penyerapan dari masyarakat sedang terus berlangsung dan kami yakin akan terus berlangsung dengan sangat baik

sampai Desember 2019, dimana panen beras September, Oktober 2019 sudah diambang pintu.

Dalam penyediaan BPTN tersebut, kami juga telah melakukan evaluasi dan kami bisa yakinkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kesiapan jaringan Bulog saat ini juga sangat baik. Pertama Bulog memiliki 26 divre, 101 sub divre, 30 canselo dan 458 gudang yang tersebar diseluruh Indonesia. 458 kompleks pergudangan yang tersebar diseluruh Indonesia. Saat ini Bulog telah memiliki outlet penyaluran seperti toko pangan kita, saat ini sudah ada 465 unit di pasar-pasar dan sampai tahun akhir ini ditargetkan 1200 toko pangan kita, grosir hadir di pasar-pasar. Kemudian rumah pangan kita dimana ada dibawah pembinaan kita 60 ribu dan yang sudah sangat aktif menjadi distributor, maaf, penjual retailer pada 10 ribu unit. Diluar itu Bulog menguasai jaringan angkutan yang siap dalam melakukan distribusi beras diseluruh Indonesia.

Dan yang terakhir dan juga termasuk sangat penting adalah Bulog sudah berpengalaman dan sudah melakukan distribusi pangan pokok diseluruh Indonesia hingga tempat terpencil. Dengan dukungan sinergy BUMN saat ini, Himbara telah menyerahkan juga jaringan 43 ribu warung, maaf baru satu dari BNI, itu pun sudah menambah 43 ribu jaringan distribusi. Kami juga sedang menuntaskan kerja sama dengan jaringan agen-agen pegadaian yang berfungsi sebagai warung dan berbagai jaringan distribusi ritel maupun grosir yang dimiliki oleh 159 BUMN seluruh Indonesia.

Demikian, terima kasih atas kesempatannya, semoga berkenan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terim kasih Ibu Judith.

Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta rapat.

Hal-hal yang penting yang telah dikemukakan oleh pemerintah berkaitan dengan fungsi pengawasan kita untuk mengawasi soal harga dan pasokan menjelang hari raya.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan ada sedikit saya tanyakan kepada Ibu dari Bulog.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Sudin.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Berapa banyak kerugian penjualan Bulog. Karena waktu itu seingat saya harga beli gulanya 13 ribu sekian, itu dijualnya berapa dan itu menjadi tanggung jawab siapa. Karena kalau Bulog mendapat PMN, itu harus ada planning perencanaan kerjanya. Karena berapa tahun lalu, saya kebetulan dai Badan Anggaran, akan diberikan 3 triliun PMN yang menolak salah satunya saya. Karena waktu itu Dirutnya perempuan, Ibu siapa saya lupa, saya tanyakan, anda dapat 3 triliun ini untuk apa, ada tidak planning kerjanya, ada tidak planning bisnisnya. Ini lho. Saya juga pernah juga bicara dengan Pak Dirut waktu itu. Bulog jangan mengkerdikan diri, Bulog tiba-tiba membuat menjual beras aset, menjual bakso sapi ini tidak dengan aset dan kebesaran nama Bulog. Coba hitung berapa besar asetnya Bulog, berapa puluh triliun. Kok menjual beras aset yang kalau tidak salah 200 gram, kok mengecilkan diri.

Itu saja Pimpinan, nanti waktu dijawab saya minta dijawab dengan jelas dan gamblang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi bu soal gula, nanti tolong dijelaskan secara detail karena ada penugasan dari pemerintah untuk penyerapan gula petani itu adalah Bulog, dengan harga 9.700/kg. Kalau ada kerugian menggunakan cadangan stabilitas harga pangan. Nah biasa ratas-ratas itu kadang-kadang tidak jelas itu realisasinya, bagaimana itu. Ini sudah ada Pak Efendy Sianipar. Kemudian siap-siap Pak Agung, Pak Agung Komisi IV, bukan Bapak.

Silakan Bang Efendy.

**F-PDIP (Ir. EFENDY SIANIPAR):**

Terima kasih Pimpinan.

Dan teman-teman Komisi IV, khususnya dari unsur pemerintah. Jadi khusus pertanyaan saya ini ke Bulog ini. Tadi kita sudah ada mempunyai RPK 10 ribu unit tambah toko pangan kita 465 seluruh Indonesia. Tapi saya melihat di Riau, kurang intensif pembinaan dari pada RPK sama toko pangan kita ini bahkan yang melakukan operasi-operasi pasar adalah langsung Bulog dan matilah semuanya. Jadi RPK yang ada sekarang ini tidak ada lagi di Riau ini. Karena tidak ada kemudahan yang kita berikan kepada RPK ini dan kualitas berasnya sangat jauh dari pada yang diharapkan. Saya baru ada kunjungan dari teman-teman di Riau, saya bertemu dengan Direktorat SDM ya, mengadukan keduanya, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan dari pada system bagaimana kita membina dari pada RPK dan kita menjadi perpanjangan tangan Bulog. Jadi ini semuanya hanya Bulog yang melaksanakan operasi pasar.

Jadi saya kira karena ini menjadi program pemerintah dari dulu dan di Riau sudah banyak saya bentuk dulu, tolong secara intensif kalau stok beras di harga beras saya lihat memang sama dengan diperdagangan tadi yang di Bulog stok beras banyak dan selalu mengeluh bahwa tidak tersalur berasnya dan sudah ada kutu-kutunya itu. Saya rasa sudah dibicarakan ke Direktur SDM. Sampai sekarang belum ada ininya, jadi permintaan saya supaya jaringan-jaringan yang sudah kita bentuk ini dan kita sudah membantu Bulog untuk ini supaya betul-betul diperhatikan dan ada kemudahannya, jangan mahal harga di pasar dari pada harga di RPK. Nah ini saya lihat di Riau nanti kita tinjau kapan. Barang ini saya kira, di Riau cukup stabil, tapi penanganan dari pada RPK yang Ibu bilang tadi 10 ribu ini RPK, kurang maksimal menurut saya dan tidak ada pengaruhnya. Dan mohon nanti kita masukan menjadi agenda kunjungan ke Riau.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Efendy Sianipar.

Jadi ini soal Bulog ya. Nanti juga dijawab ini. Pak Agung minta agar Bulog agar menyerap gabah beras petani. Bulog sudah amat berlimpah dan membebani Perum Bulog, sehingga Bulog malas untuk menyerap gabah dan beras petani. Itu Pak Oke masalahnya soal kebijakan. Karena Raskin sudah tidak ada bu ya, Ibu Judin Raskin

sudah tidak ada lagi untuk mengeluarkan beras, kata Bulog untuk apa lagi menyerap nanti kutu dimarahi Komisi IV lagi banyak kutu-kutunya, banyak beras yang rusak. Jadi ini coba diselesaikan kalian secara adat. Itu problemnya, sedangkan dari Pak Wpres juga sudah meminta Komisi IV juga sudah meminta agar Raskin dikembalikan lagi ke Bulog. Tapi sampai saat ini oleh pemerintah belum direalisasikan perdebatan soal Raskin dan Bantuan Pangan Non Tunai. Itu kemarin pada waktu beberapa tahun yang lalu juga berdebat kami disini, tapi ternyata sekarang perlu evaluasi lagi bagaimana ini soal penyerapan gabah dan beras petani kalau kemudian Raskin dari Bulog ditutup.

Pak Agung ini yang terakhir, ada lagi.

### **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Terima kasih Pimpinan.

Tentang Bulog, saya ingin menambahkan tadi sahabat saya bilang planning programmingnya, tapi bicara angka-angka, lupa menyebut bahwa disamping planning programming juga ada budgeting systemnya. Saya melihat kelembagaan Bulog secara tugas pokok dan fungsi, mohon maaf ini seperti mati gaya. Kalau Pak Sudin tadi bilang mengkerdulkan diri. Saya tidak mau mengekerdulkan diri, tetapi bagaimana caranya bangkit kembali bisa berfungsi sebagai penyangga dan juga stabilitasi harga. Ini sepertinya gammang. Saya ingin menyuarakan ide dan pendapat senior saya Bapak Roem Kono selalu pimpinan yang punya gagasan kalau perlu ditempatkan dibawah Presiden langsung, sehingga tugas pokok dan fungsi itu jelas, tidak tergeser oleh mohon maaf, lembaga haram jadah yang saya tidak tahu lahir dari rahim siapa.

Tetapi saat ini kewenangannya justeru mengambil alih peran Bulog. Kalau ternyata tidak, ia sudah siap-siap saja ditata ada beberapa personil sampai di daerah-daerah, terus kemudian koordinasi dengan kementerian keuangan, kira-kira kalau itu dirumahkan anggarannya cukup atau tidak. Terus kemudian pikirkan mereka mau suruh kerja apa. Selama ini Bulog itu membantu baik petani, baik masyarakat dan juga pemerintah. Salam hormat saya kepada Pimpinan. Cobalah Bu, selaku BUMN. Kalau ada kendala aturan, selesaikan itu, beli dengan harga tinggi, menjual dengan harga murah dengain ijin Manajemen BUMN pasti dituntut labah. Tetapi disini lain untuk stabilisasi kalau kendalanya aturan selesainya, kalau kendalanya anggaran, duduk bersama. Waktu itu ada Pak Sudin di Banggar, saya pernah ikut juga disana. Tetapi belum juga kunjung tiba perbaikan-perbaikan. Kemarin saya sudah menerima bantuan untuk warga dapi saya, tetapi bukan itu sesungguhnya. Bagaimana ketika petani panen, hasilnya bagus, melimpah ruah bisa diserap dengan baik. Kemudian ketika terjadi gejolak harga, tampil berperan dengan baik. Ini yang beras tadi isitilahnya Pak Sudin dikerdulkan.

Saya cek di Pasar Surabaya toko pangan kita keberadaannya mohon maaf Pak, saya berani bicara bahwa pendekatannya seperti seremonial atau pendekatan proyek saya, tempatnya mojak tidak terlihat, sementara pedagang-pedagang beras yang lain, mereka mudah dijangkau. Nah ini guyonan macam apa. Kalau bisa Pak, kalau mau dibesarkan toko pangan kita ini, buat gaya toko modern seperti yang sekarang Alfamart, Indomart itu isinya beras atau produk-produk yang dihier oleh Bulog.

Saya rasa itu, saya mensupport apa yang disampaikan seinor saya Pimpinan saya, Bapak H. Roem Kono. Usul secara kelembagaan, kalau tidak ingin semangkin tambah kronis. Ini penyakit birograsinya ada di hulu Pak, kewenangannya sudah berkurang, Undang-Undangnya tidak mendukung, duitnya juga tidak dikasih, belum



lagi tata kelolanya. Padahal saya sangat cinta dengan Bulog, karena kebetulan saya di Jakarta, jadi Bulog juga (Bujang Lokal).

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Agung ini bosan jadi Bupati Brebes, mau jadi anggota DPR saja katanya. Jadi kalau kelembagaan di Undang-Undang 18, 13 soal pangan, sampai sekarang belum direalisasikan oleh pemerintah. Badan Pangan Nasional harusnya Oktober 2015 itu pemerintah wajib menurut Undang-Undang harus membuat Badan Pangan Nasional. Pada waktu itu kita tanyakan ke Men PAN, katanya sudah ada drafnya di pertanian, kita tanyakan ke Pak menteri sudah selesai Mensesneg tidak jelas sampai sekarang. Pak Guntur.

**F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):**

Terima kasih Pak ketua.

Menambahkan apa yang disampaikan Pimpinan tadi tentang pelimpahan beras di Bulog, yang sekarang cukup sangat melimpah akibat kebijakan tentang penghapusan Raskin kepada swasta. Tadi Ibu menyampaikan satu pihak kemarin saya ada mendengar ada tiga solusi, tetapi solusi yang terakhir tadi Ibu sampaikan, untuk kembali beras ini didistribusikan lagi kepada TNI dan PNS. Saya berpikir ini menjadi masalah yang ribet juga, Bulog lepas permasalahan, tetapi PNS dan TNI dikembalikan kepada jaman lama dulu harus membawah karung-karung, Pespa isi beras, PNS juga demikian. Padahal banyak sekarang Pegawai, Tentara selalu tidak berada ditempat domisili. Ini saran kami untuk dapat ditindak ulang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yang bicara ini Brigjen Purnawirawan Guntur Sasono, Pak Guntur.  
Silakan Pak Ibu Kasriyah.

**F-PPP (Hj. KASRIYAH):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati dari Kementerian Pertanian,  
Yang saya hormati dari Perulm Bulog, dan  
Bapak-Ibu dari Kementerian Perdagangan,**

Kita ini setiap tahun setiap menghadapi lebaran, pasti permasalahannya bahan pokok yang kebutuhannya masyarakat yang sangat menjadi krusial bagi kita, sehingga menjadi pemikiran kita semua, pemerintah tentu saja DPR ini juga turun kebawah meninjau langsung. Tadi sudah banyak disampaikan adalah Saudara-saudara kita yang terdahulu. Dari Kementerian Pertanian, itu memang sudah dipaparkan oleh Pak Agung dan temuan juga ada beberapa kali sama-sama kita kemarin di Palembang. Tapi ada point yang ketiga ini yang disampaikan oleh waktu

kunjungan spesifik dan dijawab oleh dari kementerian pertanian, bahwa produksi bawang putih masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga kita harus impor. produksi saat ini lebih fokus pada pemenuhan bibit bawang. Saya ingin tahu lebih jauh, berapa kebutuhan kita pertahun, karena setiap tahun pasti permasalahannya ini ada. Kalau pertahun itu berapa Pak Agung dan perbulannya berapa. Kalau sekarang kita fokus pada persiapan pemenuhan pembibitan, tentu juga kita siapkan untuk kebutuhan setiap tahun lebaran dan menghadapi hari-hari besar. Itu saja dari Pertanian.

Dari Ibu tadi sudah dipaparkan dan juga oleh pimpinan diminta apa yang disampaikan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa, sejak tahun 2017, 2018, 34 Provinsi itu diundang untuk mempersiapkan ditahun-tahun berikutnya kesiapan-kesiapan kebutuhan pokok ini yang diharapkan oleh masyarakat bisa terjangkau. Tapi saya yang Ibu-ibu juga saya turun kebawah sering, bahwa yang disampaikan Ibu itu mulai dari 17 dan sampai sekarang 2019, jauh dari pada apa yang saya dapatkan di Pasar Induk. Seperti yang disampaikan tadi daging ayam, telur, daging beku tadi belum disampaikan. Nah kalau Bulan Meret saja Ibu, itu sampai ke April masih 80/kg bawang putih dan saya juga ikut. Jadi untuk kesiapan yang disampaikan oleh Ibu itu, setiap tahun rapat dengan dinas, seperti apa pengawasan-pengawasan diseluruh Indonesia. Saya dari Kalimantan Timur Ibu dan biasa langsung kepasar dan meninjau Kalimantan Timur yang langsung ke pasar. Jadi seperti juga memang pertarungan antara pedagang daging segar, itu memang harus sudah bulan menjelang lebaran ini memang sampai 140 bu perkilonya, tapi Bulog mungkin ada lebih setahu saya 70. Apakah juga sampai hari ini seperti perdagangan juga sudah berapa harga perkilonya kalau daging beku. Kalau ayam yang disampaikan Ibu hari ini atau Ibu tadi, ini hanya 34 ribu/kg. Kalau di pasar itu tidak perekor, tapi sedangkan besarnya itu sampai 50 ribu, pagi tadi masih 50 ribu. Nah untuk itu seperti apa, apakah pendistribusiannya dan lainnya dan kami ingin tahu sehingga apa yang disampaikan karena kami juga menjawab langsung kemasyarakat kami turun kemasyarakat.

Saya kira ini yang saya dapat sampaikan, terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

**Interupsi Pimpinan.**

Menambah lagi bisa?

Mumpung bertemu Pak Dirjen sama Pertanian.

**KETUA RAPAT:**

Kalau untuk Pak Agung bisa.

Silakan Pak.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Baik terima kasih.

Langsung saja Pak. Lebaran ini sudah ada diambang pintu, warga masyarakat kita ini sangat menantikan-menantikan datangnya hari raya, terutama kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Setelah disurvei, teh yang paling laris adalah THR yang paling banyak dibutuhkan. Tetapi ironinya begini, ditengah-tengah masyarakat yang akan menghadapi hari bahagia ini, harga bahan pokok ini melonjak, tidak tanggung-

tanggung terkait dengan kebutuhan bumbu dapur. Ini urusan Ibu-Ibu bangsa atau istilahnya Mak-mak kalau kawan sebelah bilang. Harga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih saya soroti disini. Ini harganya luar biasa melonjak. Tapi menyebut Jawa Tengah dari sisi pasokan dan stabilisasi harga katanya mantap. Ini tolong diperjelas, Jawa Tengahnya Jawa Tengah berapa, kalau hitungannya dapil itu ada 10 dapil kalau tidak salah diperjelas, karena di dapil kami dapil 9 Brebes, Tengal harganya tinggi.

Saya masih ingat kisarannya antara 60-70. Kemudian saya masih ingat di RPD sebelumnya rekan-rekan dari Kementan melaporkan bahwa realisasi itu sudah ribuan ton termasuk kewajiban menanam, sehingga bisa terbaca realisasinya ribuan ton dan juga itu wujudnya benih. Tahun 2017 disana disebutkan 1 juta RIPH sudah dikeluarkan, searti oleh 50 ribu ton. Kemudian yang tahun 2018 disana juga. Tetapi kenyataannya di lapangan, maaf saya berani bicara, bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang justeru tidak punya benih. Yang lebih ironi lagi saya pernah ditelepon, Pak, Bapak di Komisi IV, tolong aturannya dirubah, untuk kewajiban tanam bagi kita itu perusahaan sangat menyulitkan, cari lahannya susah, kemudian petani juga tidak mau, terus maumu apa, saya orang Jawa Pak, kalau bisa, sudah kasih duit saja. Ini kan cara-cara yang tidak mendidik. Pantas saja yang sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen dalam RPD kemarin, kemudian kita kesulitan di lapangan.

Kemudian ini yang harga eceran tertinggi, ini 60-70 ribu. H-7 ini Pak kalau tidak salah lebaran ini. Saya minta melalui pimpinan, kondisi-kondisi sosial fakta-fakta yang ada dimasyarakat ini jangan dibiarkan begitu saja. Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk bagaimana caranya warga masyarakat bisa berlebaran dengan nyaman mendapatkan bumbu dengan harga yang terjangkau, pasokannya juga cukup. Padahal bagian lagi dari sisi pengawasan, berdasarkan catatan yang ada di meja kita. Realisasi wajib tanam atau bawang putih, mohon maaf, banyak yang fiktif, diantaranya fenomena-fenomena yang seperti saya sebutkan, wajib tanam tapi mengasih duit, alasannya lahannya susah, petaninya tidak ada yang mau dan sebagainya dan sebagainya.

Contohnya dari PT. Pertani, disana disebutkan RIPH 50 ribu ton, realisasinya 400 hektar/60 ton. Berarti ada 2400 benih. Tetapi kenyataannya saat warga masyarakat kita membutuhkan, tidak ada. Bahkan bawang lokal pun juga sulit untuk bersaing dengan bawang yang impor itu. Nah saya mohon kepada pimpinan, agar kementerian pertanian ini diingatkan untuk memberikan panisemen kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang. Tetapi sebaliknya, ketika ada perusahaan-perusahaan yang memang taat azaz melaksanakan sesuai dengan aturan Undang-Undang, berikan reward. Ini fenomena-fenomena ganti jaget, tapi pemainnya lama, ini marak sekali. la kalau boleh kami berbicara juga mengatasnamakan fraksi kami, tidak hanya masyarakat saja. Jadi tolong prioritaska perusahaan-perusahaan yang memang mereka yang sudah membantu petan, riil di lapangan, waktu di Temanggung saya bersama Mbak Titik Soeharto, disana riil bahkan Pak Handoyo siap kalau misalkan dengan ketentuan besaran yang sekarang perusahaan yang sekarang tidak mau ditinggikan angka, karena ada optimisme disana. Jadi harus tegas berikan panisemen dan reward, jangan berat sebelah, apa lagi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya saat berpungli dan sebagainya. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu atau calo-calo yang mengambil keuntungan itu, tangkap jatuhi pidana. Perusahaan-perusahaan yang kiranya tidak taat asas, saya rasa pemerintah harus adil.

Terima kasih Pak.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Agung.

Bu Kasriyah ini soal bawang putih, tadi dijelaskan soal fluktuasi harga setiap provinsi ternyata berbeda ya Pak ya. Pak Agung bilang sekitar 30-35 di Pasar Induk, ternyata di Jawa Tengah 60-70 ribu perkilo. Jadi di Komisi IV ini beberapa kali diskusi spiritnya adalah bagaimana bawang putih, bawang merah dan seluruh produk hortikultura ini swasembada. Pada jaman pemerintahan masa lalu, 90% itu produksi lokal. Sekarang berapa 90% produksi impor. Makanya ketentuan 5% itu adalah dalam kerangka untuk memberikan spiritnya agar Indonesia ini bisa melakukan swasembada. Nah ini pekerjaan dari Pak Dirjen Hortikultura yang memang tidak ringan bagaimana pengembangannya itu nanti bisa dijelaskan. Termasuk juga untuk penyediaan benih Pak Dirjen. Karena beberapa perusahaan mungkin untuk akses kebutuhan benih itu ada yang susah karena kurang informasi, tapi juga ada yang dapat impor masih dengan baik, sehingga memberikan kemudahan di dalam penanaman. Tanggung jawabnya berapa, 5% ya.

Yang kedua, tadi Pak Agung menyatakan cukup 2 bulan setengah. Nah ini nanti Pak Oke minta penjelasannya, apakah dengan dua bulan setengah ini kebijakan dari pemerintah bagaimana. Komisi IV tidak menginginkan ada kegelak harga seperti masa-masa yang lalu Pak. Jadi kenaikan harganya sungguh normal, sehingga itu merugikan konsumen. Tidak boleh terjadi seperti itu. Sampai saat ini juga setiap provinsi terjadi perbedaan harga yang signifikan. Pak Agung tadi menyatakan 30-35 DKI di Pasar Induk, di Jawa Tengah 60-70 ribu bawang putih. Sangat tinggi Pak Agung. Ini menyangkut distribusi dan juga soal pasokan ini. Nah mohon dijelaskan nanti ya. Jangan sampai kemudian ini lebaran sehingga ada masalah tentang kenaikan harga pangan yang abnormal tidak boleh terjadi. Nah Komisi IV komisi pengawasannya disitu.

Ada yang lain, Pak Irwan.  
Silakan.

## **F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Bismillahirrohmanirrohim.***

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,**

Saya melihat bahwa permasalahan impor ini kedepan tidak akan pernah teratasi kalau tidak ada koordinasi yang baik antara beberapa instansi, khususnya saya melihat bahwa kementerian pertanian dan kementerian kalutan dan perikanan tidak mampu mengatasi kebutuhan nasional. Saya dari awal dilantik Oktober 2018 lalu sudah mengingatkan kepada kementerian pertanian, agar distribusi benih, bibit dan pupuk, itu kalau bisa ditribusikan tepat waktu, jangan didistribusikan setelah melewati masa tanam. Karena ini juga sangat dikeluhkan oleh kelompok tani, sehingga mereka banyak kecewa. Sehingga saya sangat berharap bahwa persoalan ini kedepan bisa teratasi khususnya pada saat memasuki masa tanam selanjutnya.

Yang kedua soal impor. Saya melihat bahwa kalau memang tidak ada koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang saya sebutkan tadi, mungkin saya lebih cenderung mungkin bagaimana kedepan ini supaya diadakan badan impor saja.

Bagaimana supaya koordinasi-koordinasinya lebih efektif supaya tidak lagi katakanlah satu instansi yang menonjol dan tidak melibatkan instansi yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan.

Saya pikir itu saja.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Irwan.  
Kalau sudah tidak ada lagi, ini Pak Roem Kono.  
Silakan.

#### **WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):**

Terima kasih Pimpinan,

#### **Bapak Dirjen dan Perum Bulog yang saya hormati,**

Ya saya tadi menyimak pembicaraan, saya kira bulan puasa tahun ini rasanya adem-adem saja, tidak ada gejolak dimana-mana seperti tahun-tahun yang lalu ya. Apakah ini karena tahun politik lewat atau apa, tidak tahu saya, apa memang kecapean atau memang stabilitas bagus. Ini feonemenya lagi saya perhatikan betul, apakah begitu juga masalah impor tidak hiruk-pikuk. Mungkin mengikuti irama politik ya atau memang kinerjanya pemerintah kompak sekali sekarang ini antara Kementerian Perdagangan, Bulog dan Kementerian Pertanian sehingga stabilitasnya bagus harganya, rakyat tidak berteriak atau politikus-politikus tidak ikut berteriak, sehingga dibawahnya juga tidak ada yang berteriak. Nah ini juga harus kita kaji betul betul, karena kita ini menyangkut rakyat banyak. Yang pasti sekarang saya memberikan apresiasi kepada semua pihak, sehingga bisa terjadinya suatu stabilitas harga yang bagus, saya juga sudah keliling tidak ada gejolak itu terutama di bidang horti ya, juga dari pangan juga stabil, kalau pun ada kenaikan sedikit-sedikit bahkan melimpah. Terutama untuk horti itu di kampung saya itu tomat harganya cuma 3 ribu satu kilo, 5 ribu satu kilo. Jadi memang kalau ditata sebaik-baiknya, maka saya kira kita punya produktifitas dari hortikultura dan juga masalah hasil bumi kita mungkin lebih bagus lagi.

Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya masalah stok beras. Apakah stok beras itu masih ada apakah masih ada sebagian- sebagian dari pada impor yang belum tersalurkan. Kemarin kita ribut-ribut masalah impor karena kekurangan beras. Sekarang apakah stcok itu termasuk yang diimpor kemarin itu apakah masih ada atau tidak. Kalau masih ada kenapa tidak tersalurkan. Penting juga kita pertanyakan.

Kemudian juga masalah ini, Ibu Judin kita bicara masalah rumah pangan kita. Saya kira saya setuju tadi yang katakan Pak Agung, itu sifatnya sermonial. Di daerah di Gorontalo itu masih terbatas saja dan Bulog belum apa-apa sudah mencurigai rakyat, bahwa dia tidak akan mampu tidak akan bayar, pasti laris. Jadi tidak mau rugi dulu dan bayar itu tunai, tidak system. Mana ada rakyat kalau memang mau begitu, mendingan beli sendiri saja di mungkin dia beli langsung publikasi mungkin lebih murah mungkin. Nah itu di Gorontalo belum jalan, karena masih sifat-sifat komersialnya dari Bulog masih ada.

Selanjutnya juga masalah Raskin tadi. Saya itu sudah tiga kali bicara dengan Menteri Sosial, kawan saya. Mungkin sudah disampaikan oleh melalui Ibu Judin juga sama Pak Bachtiar, mereka itu menunggu peticaraan secara resmmi. Terakhir saya

bicara dengan Menteri Sosial, mereka kalau bisa Pak Buas bisa bertemu saya membicarakan masalah ini. Jadi ini memang ditunggu oleh kementerian sosial membicarakan masalah penyaluran raskin ini. Yang penting ada dua hal pertama, masalah kualitas beras, yang kedua masalah harga. Itu saja mereka menunggu dan itu sangat terbuka sekali. Jadi saya kira tidak perlu lagi Bulog mengadu kesini, karena itu sudah terbuka mereka saya sudah bicarakan. Silakan saja segera apa lagi ada intruksi dari Wakil Presiden kemarin. Saya kita itu harus dijalankan kewajiban pada kementerian sosial menjalankan itu.

Demikian.

#### **KETUA RAPAT:**

Kementerian Sosialnya dari Horti apa Pak?  
Sudah mantap kalau begitu.  
Pak Sudin silakan.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

#### **Yang saya hormati Saudar Dirjen Perdagangan, kemudian dari Pertanian dari Bulog.**

Saya ini bingung ketua, sangat bingung. Lebaran itu bukan hanya baru kali ini Pak. lebaran itu mungkin sudah sekian ratus kali, kok pemerintah ini tidak ada planning. Harusnya kebutuhan a, b, c, d itu sudah bisa dihitung. Oh ia nanti lebaran bulan 6, disiapkan, baik itu daging impor, bawang putih, buah-buahan dan lain-lain. Kan bisa jauh hari. Ini kok seperti pemadam kebaran, bawang putih harga mahal, perdagangan sibuk operasi pasar. Kementerian Pertanian saya sama Pak Suwandi ke Lampung di kampung saja, operasi pasar. Kok tidak ada planning. Kalau planningnya tepat, barangnya tersedia cukup, stoknya cukup jangan ada operasi pasar lagi. Ini lho yang saya bingung.

Kemudian yang hebat lagi tadi Ibu Direktur mengatakan 240 personil yang ada di provinsi, buat apa ada dinas perdagangan provinsi, tidak perlu menempatkan orang, jaman sekarang teknologi, data bisa dikolek, data bisa dikirim, data bisa dilihat, tidak perlu datang, tidak perlu ditunggu, kecuali jaman Belanda. Ini lho. Kan bisa dilihat data. Stok bawang putih, stok daging, stok beras di daerah ini ada tidak. Ini kok tiba-tiba harus operasi pasar. Sepertinya kok tidak ada perencanaan. Apa tidak punya data kementerian perdagangan. Hari normal kebutuhan pokok dibutuhkan oleh rakyat sekian ton, pada waktu awal bulan puasa sekian ton. Pada waktu menghadapi lebaran sekian ton, berarti tidak punya data, begitu juga kementarn persiapannya. Seharunya oh jelang dua bulan sebelum memasuki lebaran apa yang banyak dibutuhkan oleh rakyat, disiapkan, diatur. Kalau memang seperti impor atau sapi, kan ada ketentuannya sapi itu tiga bulan harus dikarantina, harus penggemukan dulu. Kalau lebarannya Bulan Juni, berarti Januari sudah harus masuk sapi atau daging importnya atau bawang putihnya ada lain-lain. Ini tidak. Kesannya gampanglah operasi pasar supaya dilihat oleh Presiden, oleh Pak Jokowi, wah Kementan sama perdagangan sangat rajin, tapi itu hal yang salah. Saya sama Pak Dirjen ditempat saya lahir di Kecamatan Banjar, operasi pasar bawang putih, yang beli siapa, ia sebagian besar ia pedagang, karena minimum harus belinya satu karung, kalau rakyat tidak mampu. Apa bisa setiap kabupaten diadakan operasi pasar, kan tidak, hanya tertentu-

tertentu saja. Ini lho yang disayangkan. Negara kok tidak ada perencanaan. Itu yang saya sayang kan sebetulnya.

Kemudian Pak Dirjen Hortikultura kita semua tahu, produksi bawang putih tidak mungkin maksimum. Saya sudah mengusulkan berapa kali dalam rapat ini. Wajib tanam itu banyak bohongnya juga, banyak fiktifnya. Apa yang dikatakan Pak Agung. Ada pedagang dari Cina, buka kontainer di Pasar Induk. Dari mana dia datapkan itu RIPH. Ini lho ketua yang saya bingungkan. Ada Menko Perekonomian yang tugasnya apa, mengkoordinir masalah Bulog, Perdagangan, Pertanian, kok sepertinya tidak didengar. Ratas memutuskan untuk supaya harga bawang putih jangan terlalu tinggi, Bulog diberikan jatah 100 ribu ton. Secara kenegaraan itu sangat baik, tapi kalau secara etika perdagangan, tidak bagus, orang lain suruh tanam, sementara Bulog tidak, itu kan tidak benar. Harus ada keadilan. Bulog kan juga bisa tanam, bukan tidak bisa tanam. Ini lho ketua yang saya kadang-kadang bingung. Fluktuasi harga selalu terjadi menjelang sebelum lebaran. Kemudian Dirut Bulog mengatakan ada kartel, 94% perdagangan pangan di Indonesia dikuasi oleh kartel, kartelnya yang mana. Kalau menyebut hanya kartel, tapi kartel yang saya tahu susah kita. Sama saja kalau kita lewat depan kuburan Bapak-Ibu, katanya disitu ada kuburan hantu, yang sudah pasti kalau dikuburan itu ada orang mati, bukannya ada hantu. Ia 90% tadi kartel yang mana. Kalau memang harus diubah Undang-Undangnya untuk mencegah terjadinya kartel, ayo kita rubah, kita perbaiki negara ini. saya juga mendengar isu yang kurang sedap tentang kementerian perdagangan. SPI selalu dilambat-lambatkan, jelang ujung baru dikeluarkan, oleh siapa, oleh oknum, bukan oleh menteri, oleh oknum. Bahkan Komisi VI ketua, sempat curhat sama saya. Anda Komisi VI bisa punya hak bertanya untuk membuat pasar-pasar modern, habis oleh oknum yang biasa dipedagangan yang menjadi Caleg Jawa Tengah V. Ini lho yang disayangkan. Kok bisa begitu. Kalau kami dengan kementerian pertanian jelas, menyalurkan alat mesin pertanian. Ini Komisi VI saja tidak dilihat. Saya juga ingin mendengar langsung, bagaimana alur SPI dikeluarkan. Saya minta Saudara Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tadi belum bicara ketua, tolong jelaskan. Kalau mengenai kebutuhan bawang putih di Indonesia, itu hampir 500 ribu, 490 ribu sekian data yang dari BPS. Yang kasihanny lagi teman-teman pedagang dapat RIPH 20 ribu ton, tiba-tiba SPI nya dikeluarkan 10 ribu ton. Kewajiban tanamnya berapa, ia tetap 20 ribu.

Minggu lalu saya kedatangan seorang pengusaha, Pak Sudin saya mau mengadu, saya pengusaha, anda usaha apa, saya usaha bawang goreng, dimana, di Medan. Saya tanya, kau punya alamat, pabrik kau dimana. Sibuk dia buka alamat. Oh ini Pak alamatnya Pak. Saya katakan, anda bukan pedagang, anda bukan pemilik. Saya dihambat SPI nya, saya dihambat RIPH nya, apa yang anda mau import bawang bombai kecil, merugikan petani, sayang tidak petani bawang merah merugikan dan anda ini calo saya bilang, anda bukan pemilik. Kalau saya punya pabrik, saya tidak perlu lihat alamat, saya tahu alamat pabrik saya dimana. Dia buka dulu pabriknya, alamatnya oh, ini Pak Sudin, mengambil kaca mata, alamatnya ini Pak, saya bilang anda pergi, anda keluar dari ruangan saya, adan boleh bicara dengan siapa, coba anda pergi. Karena apa, kalau bawang bombai kecil itu merugikan petani, nanti pada waktu panen, bawang merah kasihan petaninya dan sepertinya Pimpinan, kementerian perdagangan ini tidak ada planning perihal apabila panen, apabila panen cabe melimpah. Apa solusinya, solusinya tidak ada. Kenapa tidak mindset rakyat dirubah. Rakyat kalau beli cabe segar sekilo sekian, kenapa tidak dirubah jadi cabe bubuk.

Kita kalau di luar negeri makannya cabe bubuk, tidak mati. Harusnya mindsetnya dirubah, diberikan terobosan apabila panen besar, ia dibuat cabe bubuk. Ini tidak, sepertinya tidak ada planning. Ia sudah kalau harga cabe jatuh, petani rugi

ia matilah engkau. Paling Pak Suwanti sibuk, konferensi pers, mengajak bulog beli, apa selamanya begitu, itu bukan jalan keluar, itu cuma jalan sementara. Bagaimana negara ini untuk berkelanjutan. Jadi gunakan hati nurani kita untuk kepentingan rakyat. Dan saya juga tahu kok di kementerian perdagangan, banyak Si a, si b, si c sudah tahu. Ini lho yang terjadi. Saya amat sayangkan sekali. SPI keluar juga saya tahu, kebetulan Pak Bahrul yang mantan dirjen lama, teman saya, ada beberapa teman saya staf-staf diperdagangan, saya sering konsultasi sama mereka, Bahrul pun masih sering saya telepon. Ini lho yang disayangkan. Jadi jangan pakai istilah maju tak gentar. Mungkin Pak ketua tahulah apa yang saya maksudkan maju tak gentar. Jadi saya minta keterangan saudar dirjen perdagangan luar negeri, alur keluarnya SPI. Dan saya juga memohon baik kepada kementan maupun kepada perdagangan. Jangan mendahului pedagang besaran, pedagang besar itu sudah kaya. Kenapa tidak pedagang kecil yang mereka berkumpul jadi satu impor 5 ribu ton atau 6 ribu ton. Itu yang dipentingkan, jangan yang sekian puluh ribu ton. Sekian puluh ribu ton pasti mereka mampu, kalau yang kecil ia tidak mampu.

Saya minta penjelasannya dulu Pimpinan.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sudin.

Kita berharap nanti Pak Sudin tetap di Komisi IV, karena bisa mengkritisi beberapa persoalan.

Kami persilakan kepada pemerintah untuk menanggapi.  
Silakan.

#### **KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Baik terima kasih Pak ketua dan anggota.

Yang pertama-tama tentu kami sampaikan terima kasih atas masukan, saran dari Bapak-Ibu sekalin, tentu ini suatu yang berharga bagi kita untuk perbaikan kedepan. Yang pertama terkait dengan distribusi benih dan pupuk. Tadi Pak, Insya Allah terus mencoba memperbaiki Pak. Memang ada beberapa tempat mungkin masih ada kekurangan dan kami akan mencermati lagi kedepan kami perbaikan lagi.

Pak Roem Kono tidak ada ya. Mudah-mudahan memang betul Pak, memang supplynya cukup, sehingga tidak ribut. Kemudian yang Ibu Kasriyah tadi, kebutuhan bawang putih itu sekitar 40 ribu ton perbulan. Nanti tepatnya Pak Dirjen Horti yang akan menjelaskan, termasuk Pak Agung. Di Pasar Johar hari ini 28 ribu Pak. Jadi mencoba terus mengupdate. Mungkin itu harga seminggu yang lalu Pak, tapi nanti secara detail Pak Dirjen Horti terkait bawang putih, termasuk pertanyaan Pak Sudin. Bagaiman roadmap kita untuk ita bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh beliau.

Suatu hal Pak ketua yang ingin saya sampaikan. Tadi pertanyaan Pak ketua terkait dengan serapan gabah bulog. Kalau kita cermati sebetulnya target serapan gabah bulog juga tahun ini, itu jauh diwabah tahun-tahun sebelumnya. Karena kita melihat bahwa ada perubahan kebijakan yang tadinya rastra, kemudian rastra berubah menjadi BPNT dan Bulog hanya mempunyai 50% kuota untuk mensupply ke BPNT. Kemudian 5,2 juta KPM. Jadi Bulog mendapatkan itu, sehingga kita membuat



retargeting serapan Pak. Kalau tahun lalu sampai 3 juta ton secara beras. Tahun 2019 ini kita turunkan 1,8 Pak. Yang kedua begini Pak.

**Pak Ketua yang saya hormati.**

Kami juga mencoba mencari solusi bagaimana Bulog bisa mampu menyalurkan stok yang ada, dananya target-target serapan. Kita tahu di Indonesia ini tidak semua provinsi plus. Mungkin ada 11-12 provinsi yang plus produksi beras. Ada yang mengatakan yang plus sebenarnya 7, yang lainnya itu plus-minusnya sama balance. Berarti ada sekian provinsi yang minus. Itu yang kami dorong Pak ketua kepada Bulog, menggerakkan lebih lagi perdagangan antar pulau, antar provinsi ini adalah pasarnya bulog. Karena pedagang-pedagang dak tidak mungkin mampu melakukan itu. sedangkan Bulog dia punya gudang disetiap kabupaten, armdanya ada JPL (Jasa Layanan) tranpsortasi yang dimiliki oleh Perum Bulog yang ini bisa digerakkan. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Agung, betul Pak tadi Pak.

Jadi kita melihat dalam satu tahun itu dimana Pak harga itu turun. Pada saat harga turun, kita serap sebanyak-banyak, kemudian pada saat harga tinggi, kita lepas. Artinya apa, memang kita menginginkan Bulog mempunyai fungsi stabilitas. Nah satu contoh ini Pak keta. Kita punya target 1,8 juta ton, kita atur Pak, 1 juta ton bisa kita penuh sampai bulan 6, karena kita tahu setelah bulan 6 sampai Bulan Desember, ini produksi kita tidak sebagus bulan 1 bulan 6, semester II biasanya lebih rendah. Oleh karena itu 1,8 juta ton dengan 6 bulan pertama kita dapat, kemudian selisahnya kita mendapatkan 6 bulan kedua. Itu sebenarnya sudah kita atur. Begitu juga mengenai harga. Harga sekarang ini rendah Pak. Tetapi bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember, ini harga tinggi. Nah disinilah sebetulnya yang kita inginkan Bulog mempunyai peran disana sebagai stabilisasi.

Bapak-Ibu sekalian.

Pak ketua, saya kok tidak khawatir Pak, kalau Bulog tidak memang BPNT. BPNT ini sebetulnya sudah ada suppliyernya. Kalau kita diharusnya melalui Bulog, sebetulnya hanya dipindahkan saja sebetulnya. Para penggiling padi produsen padi itu sudah supply BPNT. Jadi nanti kalau dipindahkan ke Bulog, ini hanya melalui Bulog itu hanya dipindahkan saja, dilewatkan Bulog, toh akhirnya dijual juga. Nah yang jadi masalah sekarang Pak, BPNT sekarang, ini adalah supply ke daerah-daerah yang memang belum bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu Bulog diberikan kuota 5,2 juta KPN tahun 2019. Kemarin arahan Pak Wakil Presiden, saya dengar juga saya baca berita kemarin akan dinaikan tidak 50%, tetapi menjadi 70%. Nah 70% ini tentunya akan dibuka pasar baru. Tetapi tujuannya adalah untuk mengatasi yang tidak bisa disalurkan dengan baik, kenapa, karena Bulog punya jaringan yang lebih baik. Jadi yang diharapkan adalah dengan dipindahkannya Bulog masalahnya yang tadi tidak bisa disalurkan secara langsung tanpa melalui Bulog, bisa diperbaiki. Itu harapannya. Mudah-mudahan itu menjadi pasar baru bagi Bulog di dalam menyalurkan stok yang ada. Tetapi saya masih melihat kemungkinan besar adalah perdagangan antar Bulog, perdagangan antar provinsi yang ini menjadi market sharenya Bulog.

Saya rasa itu dari saya dan saya mohon Pak Dirjen Horti untuk menjelaskan terkait dengan.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Ia terima kasih.

**Bapak Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.**

Pertama Ibu Kasriyah tentang produksi impor tadi sudah dijawab Pak Sudin, betul bu. Jadi setahun sekitar 500, pasnya 571 ribu ton. Itu baik untuk konsumsi dan industri, tapi sebagian besar konsumsi. Sehingga perbulan kebutuhan bawang putih itu 42 ribu ton perbulan. Nah karena produksi dalam negeri semuanya difokuskan untuk benih tadi ada ditayangkan, sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri hampir seluruhnya dari impor, karena produksi dalam negeri dijadikan untuk benih. Kemudian Pak Agung tadi juga saya setuju. Importir ini ada wajib tanam 5%, ada yang berhasil ada yang tidak ada yang ganti baju dan seterusnya Pak. Tahun lalu sudah di blacklist 5 perusahaan importir yang nakal untuk bawang putih dan 10 bombai Pak Sudin, tadi ada cerita-cerita tadi tentang bombai.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Pimpinan.

Melalui pimpinan sejini pimpinan, itu yang sudah di blacklist barangkali datanya bisa dikirim, sehingga kita ikut mengawasi di lapangan.

Terima kasih Pak.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Terus itu tahun lalu Pak. Sekarang juga berdasarkan tanam yang tidak menanam dan tidak realisasi tanam, 38 juta kita blacklist. Jadi ada plus dijumlah dari situ. Jadi kita tidak main-main. Apalagi kalau ada calo-calo Pak, silakan kalau ada bukti-bukti langsung lapor ke penegak hukum, karena program bawang putih ini juga merupakan program Stranas KPK diawasi, termasuk dari Bapak Dewan, Pak Sudin juga mengawasi di Lampung.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Pak Dirjen, itu bagaimana proses pengawasan urusan-urusan perusahaan yang klonik itu.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Kami berusaha melacak, kalau dari segi kementerian pertanian, berdasarkan berkas data-data. Kalau kelihatan grup atau ganti baju, ganti jaket tadi, itu biasanya dari struktru pengurus dari perusahaan. Data-data dari perusahaan itu komisaris, direksi atau beda agak sulit. Tapi kami juga mendata dari cara mengajukan RIPH. Kalau kalau mengajukan RIPH kok mulus tidak ada robek, ini berarti sudah pengalaman. Itu saja cara-caranya. Tapi diteliti lagi di lapangan yang menanam di lapangan siapa.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

KPPU ikut tidak Pak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dia ada metodenya.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Ia silakan. Itu semua boleh Pak. Cuma kalau sesuai kewenangan kami sesuai RIPHK itu prosedur yang tertib aspek teknis, tanam dan dokumen-dokumen administrasi lainnya. Tapi kalau mengarah kesitu kami memang banyak keterbatasan, kalau ada dukungan KPPU dan yang lain juga bagus. Bahkan dari BIN ya Pak Sudin lebih bagus itu untuk melihat perusahaan yang ganti baju. Kemudian.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan Interupsi Pimpinan.

Kalau yang tanam tidak berhasil, itu bagaimana. Langsung di jawab Pimpinan, ijin.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Sesuai Permentan nomor 38 itu bukan wajib tanam Pak, tapi wajib tanam berproduksi, sehingga kalau tanam belum sampai angka produksi sesuai persennya, kami tetap tagih produksi. Dan kalau produksi sesuai itu, dari tanam itu ada berita acara kalau sudah lulus, ia kita layani di RIPH berikutnya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Kalau tanamannya gagal bagaimana?

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Gagal itu ada dua macam Pak, ada gagal karena faktor alam dan seterusnya itu ada kompensasi kepetani yang gagal Pak dan memang kita minta. Kalau tidak mau mengasih kompensasi petani menanam tiga bulan Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Seberapa pengawasan seluruh wilayah tanam. Pengawasannya bagaiman. Seluruh wilayah sekian ribu hektar bagaimana mengawasinya.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Kita di pusat ada timnya Pak itu, kemudian disetiap kabupaten dan provinsi ada dinas dan kita di lapangan ada petagas lapangan yaitu penyuluh. Sehingga kami.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pek Dijren percaya sama dinas?

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Ia sampai saat ini karena dia juga melaporkan Pak. Kami juga punya tim. Jadi kroscek ulang Pak apa yang terjadi di lapangan, saya sendiri juga menemukan Pak di lapangan yang tidak berhasil tanam memang harus sampai berproduksi, bukan hanya taman.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, tadi Pak Dirjen mengatakan, kebutuhan bawang putih Indonesia plus minus 500 ribu ton. Kok kenapa periode lalu, RIPH nya dikeluarkan 1 juta ton. Ada apa ini.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Jawab langsung.

Ijin Pak Pimpinan ya.

Di RIPH tidak mengatur volume, tidak mengatur kuota, tidak mengatur kuantum berapa yang disetujui di RIPH, karena RIPH hanya berdasarkan bagaimana aspek teknis pertanian. RIPH itu rekomendasi Pak, bukan ijin. Dan rekomendasinya dikaitkan dengan wajib tanam dan aspek-aspek administrasi lainnya, tidak mengatur kuota volume. Jadi volume satu juta ton tahu lalu, itu betul-betul usulan dari importir yang masih kedokumen online. Nanti dari SPI, Pak Oke yang akan menetapkan berapa kuota volume itu ada di SPI bukan di RIPH.

Demikian. Itu sesuai Permentan Pak.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Boleh tambah Pak, tanya.

**KETUA RAPAT:**

Satu lagi soal bibit tadi Pak Wandu.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Oh ia begini saja, nanti saya kasih daftar produsen yang sekarang punya stok berapa, saya WA saja. Sekarang ada benih itu.

**KETUA RAPAT:**

Artinya dari sisi penyediaan bibit dari kementerian pertanian tidak ada masalah ya. Jadi untuk akses kebutuhan bibit dari para yang akan menanam tidak ada masalah ya. Jangan jadi alasan, karena yang disalahkan nanti kementerian pertanian itu. Biar clear itu Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Pak Wandu kalau bibit itu dijual dengan harga berapa, ada patokan harganya tidak.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Saya tadi daftar dulu Pak, yang mana Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ia Pak Sudin belum selesai.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Bapak mentang-mentang ada teman pimpinan di depan, Bapak mau nyelah saya saja. Pak Wandu, ada tidak ketentuan harga patokan bibit dari Kementan kepada penangkar atau pun kepada petani.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

Kementan tidak mengatur harga Pak, tapi harga pasaran sudah ada dan terbetuk, itu dengan cara memang para produsen kumpul, rapat supaya harga terjangkau dan seterusnya itu 50 ribu pasaran. Tapi yang dapat bisa kita kendalikan petani penangkar yang mendapat bantuan APBN itu. Kalau yang petani-petani dan penangkar yang dipasilitasi oleh RIPH importir, di pasaran ada sampai 60 an ribu. Nah kami bisa bantu yang APBN kita dorong supaya murah terjangkau 50 ribu. Dan ini juga untuk memberikan insentif bahwa usaha budidaya dan produksi benih itu menguntungkan bagi pelakunya, sehingga ini akan mempercepat untuk mendorong swasembada di situ.

Terima kasih.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan sedikit lagi.  
Sebentar Pak Agung.

**KETUA RAPAT:**

Sedikit itu artinya tidak banyak, berarti cepat.  
Silakan Pak Sudin.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Dari evaluasi dirjen, yang dikucukan dari APBN, berapa persen yang berhasil dan berapa persen yang tidak. Karena setahu saya Pak, bukan gagal, bilang 50 hektar, tanamnya 20, hasilnya tidak ada. Contohnya yang kemarin yang kita ke Lampug. Beliau bilang tidak mau karena dinasnya sepertinya begini-begini tidak tanggung jawab. Betul kan Pak. Ini lho. Kalau saya bilang APBN untuk bawang putih jangan adakan saja, suruh swasta semua, kalau perlu dirubah jangan tanam, stok bibit bawang lebih banyak lagi. Itu lebih efektif, tugasnya kementerian pertanian bekerja sama dengan petani, tak kasih bibit bantuan pupuk subsidi, ia sudah. Pak petani itu Bapak kasih bantuan apapun, jawabnya apa tidak cukup Pak. Harga jagung hari ini dipasaran 30 ribu/kg, untung tidak.

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

la begitu Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Apa begitu?

**DIRJEN HORTIKULTURA (SUWANDI):**

la begitulah Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Modal kamu berapa satu kilo, 1800/kg biaya produksi, jual 3 ribu, tidak untung. Karena apa, bulan lalu Pak, panen yang lalu itu masih 4500. la itu petani mentalnya. la Pak Agung mohon maaf Agung.

Silakan Pak Agung.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Agung.

Tidak jadi. la sudah oke, kalau tidak jadi. la termasuk Pak Oka yang penugasan dari Bulog yang 100 ribu itu jangan sampai multitafsir, coba dijelaskan bagaimana.

**KEMENDAG (OKA):**

Baik Pak.

Jadi ada dua harus saya tanggapi, terutama kaitannya dengan penugasan Bulog dan alur SPI Pak.

**Yang terhormat para pimpinan,**

Ijinkan dalam tahap pertama saya menyampaikan latar belakang tentang hasil Rakortas tentang penugasan kepada Bulog yang 100 ribu. Memang diawali di oleh Bulog itu diusulkan sejak tahun 2018. Yang pertama Bulog membutuhkan waktu dalam wacana dibicarakan disampaikan bahwa Bulog akan bersiap-siap untuk melakukan stabilisasi harga. Dalam rangka stabilisasi harga 2018 ini belum bergejolak Pak, harga masih 25 ribu. 2018 itu Bulog mengajukan untuk dapat kuota persetujuan bawang putih sebanyak 200 ribu ton. Direspon betul ya Pak Agung ya. Direspon oleh Pak menteri, pada saat itu menyampaikan perdagangan menyampaikan ketidaksetujuannya karena kalau diberikan akan terjadi perlakuan tidak adil kepada importir yang apa lagi pada saat itu diwajibkan menanam.

**KETUA RAPAT:**

Mohon maaf Pak Oka sebelum dilanjutkan, Bulog itu apakah juga mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak mendapatkan perlakuan yang tidak sama, harus wajib tanam 5%.

**KEMENDAG (OKA):**

Untuk kepentingan stabilisasi harga, maka BUMN dalam hal ini Bulog boleh diberikan penugasan tanpa harus melaksanakan kewajiban tanam.

**KETUA RAPAT:**

Itu yang dibilang Pak Sudin tidak adil itu ya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Maaf Pimpinan Interupsi.

Pak, seharusnya kan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog anak buahnya Presiden, harusnya komunikasi yang baik. Oke Bulog tidak wajib tanam, tapi Bulog wajib menyetorkan benih. Kan solusi jalan terbaik kok. Inikan karena apa, kalau saya lihat komunikasi yang tidak bagus antar lembaga kementerian.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Oka.

**KEMENDAG (OKA):**

Baik Pak.

Jadi pada saat itu saya setuju apa yang disampaikan Pak, bahwa yang disampaikan alasan dari kementerian perdagangan yaitu adalah untuk memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini karena telah membantu pertanian bertanam.

Selanjutnya pada Bulan Maret 2019, ini cerita yang Rakortas, harga sudah mulai terasa naik, puncak-puncaknya itu April-Mei. Dari sejak 2018 akhir, kami sudah komunikasikan dengan bekoordinasi dengan kementerian pertanian. Yang pertama yang kami komunikasikan di 2018 itu adalah terjadi usulan persetujuan impor, pengusulan persetujuan impor dengan kuota sampai tadi yang disampaikan adalah 1 juta ton. 1 juta ton ini memang kami ambil INSW. Kita kumpulkan, karena setiap pemilih RIPH dari kementerian pertanian begitu menerbitkan RIPH, itu tidak dikirimkan secara hard copy, tapi online dan masuk Indonesian national *single window*. Sehingga kami tidak perlu meminta RIPH, tapi kita tinggal cupli. Apa yang salah satunya yang kita dari INSW itu adalah besaran kuota. Sehingga perhitungan kami sampaikan bahwa Pak dirjen, kuota yang disampaikan kepada kami pada 2018 yang diusulkan mereka yang mengajukan melalui Intrade untuk persetujuan impornya itu adalah sebesar 1 juta ton, sementara kebutuhan 450.470 ribu ton. Sehingga bahkan pada saat akhir 2018 tadi kita sudah saling pertukaran data, yang masuk di bulan November dan Desember 2018 itu, kurang lebih di atas 200 ribu ton. Kalau angka tepatnya Pak Suwandi menghitung 220 satu ribu ton. Itu yang masuk diakhir tahun 2018.

Tapi pada saat Rakortas disampaikan mulai ada kenaikan, sehingga yang pada puncaknya pada tanggal 18 Maret, nah Bulog mengusulkan untuk melakukan stabilisasi harga. Tapi kami karena kita sudah berkomunikasi bahwa kami sudah menerbitkan persetujuan impor sebanyak 600 ribu ton, yang masuk pada Bulan Desember 227 ribu ton. Artinya sementara ini barang harusnya masih ada, sementara

harga sudah melonjak. Nah penyebabnya apa. Itu yang harus kita cari. Satgas pangan tidak terjadi atau tidak ditemukan penimbunan. Sementara kalau ceritanya kami begitu kunjungan ke pasa di lapangan, akhir-akhir ini ditemukan bawang putih yang sudah tumbuh tunasnya, artinya bawang putih itu adalah hasil simpanan lama.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Pimpinan boleh, ini mumpung lagi topiknya masuk disitu.

**KETUA RAPAT:**

Jangan lama-lama.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Baik.

Jadi kalau bicara kuota, kementerian pertanian ini mengeluarkan persetujuan seperti ijin prinsip seperti itu kan Pak ya, terus nanti ditindaklanjuti SPI. Kebijakan ini sudah baik, tetapi pertanyaan saya, terjadi bias implementasi tidak dari kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik ini. Saya pakai pepatah bilang, ada gula ada semut. Ketika kebijakan itu baik dan ada nilai lebih, nilai untung perusahaan, mereka akan berbondong-bondong, apa itu yang mereka taat asas atau tidak. Pertanyaannya, yang dikeluarkan ini semua yang taat asas atau tidak. Karena ada keluhan-keluhan, itu keluar, kok saya tidak. Padahal sudah melakukan kewajiban-kewajiban. Begitu Pak.

Silakan.

**KEMENDAG (OKA):**

Mohon ini.

Mungkin jawaban saya tunda sedikit, karena saya dalam koridor menerangkan kenapa Bulog dulu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jangan dipotong lagi ya.

Silakan Pak Oka

**KEMENDAG (OKA):**

Jadi mengajukan, cuma arahan kami tetapi diminta oleh pimpinan itu adalah untuk memprioritaskan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan penanaman dalam hal ini telah membantu petani. Jadi itu juga kalau kami sebagai pelaksana, itu juga sudah diperdebatkan antar pimpinan. Nah yang pertama itu dulu. Sehingga sampai saat ini untuk pemberian atau menindaklanjuti arahan Rakortas menugaskan Bulog untuk importasi itu masih ditunda. Nah sementara kami tadi ceritakan, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen, Pak Suwandi disini bahwa sudah ada sekian, Pak Suwandi pun memberikan informasi ada blacklist 23 perusahaan, sehingga itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam menerbitkan PI dan sebagainya. Artinya, jadi saat ini, nah pada saat awal tahun 2018, dirasakan bakal kenaikan. Kami sudah konsultasi lagi. Pak Suwandi kapan keluar RIPH, jawabannya beliau, saya lagi pusing memverifikasi, karena satu-satunya. Apa lagi tadi



disampaikan oleh Pak Suwandi, ini saja 23 blacklist, 38 malah yang tertulis disampaikan kepada kami itu 23. Jadi kalau ada 38 itu akan jadi pertimbangan dalam menerbitkan PI yang akan keluar ini Pak, karena sudah blacklist. Nah sehingga tadi arahan pimpinan menunda dulu untuk persetujuan Bulog ini dan mengutamakan kepada RIPH. Ujung-ujungnya setelah di Rakortas ini, dilakukan keluarga juga RIPH Pak, delapan. 8 RIPH yang jumlahnya 115 ribu ton. Saya teliti pada mereka, kinerjanya performancenya dari pada calon importir yang dapat RIPH. Saya tidak meneliti kalau dia sudah tanam Pak, yang pertama saya teliti ada tidak diblacklist, ada tidak selain tadi. Staf tentunya secara prosedural memeriksa kelengkapan baik itu kepemilikan gudang, kepemilikan alat transportasi yang memang kita persyaratkan dan sebagainya.

Hal yang menarik perlu saya sampaikan, dari 8 yang terbit RIPH nya yang harus kami terbitkan PI nya, karena itu harus segera saya terbitkan, harga sudah fluktuasikan, sudah naik yang disampaikan Ibu dan sebaainya. Yang menarik adalah ternyata dari 8 itu, 6 perusahaan baru, 2 lama. 6 perusahaan itu kenapa saya bisa sebutkan baru, karena tidak ada rekam jejak impornya tahun sebelumnya. Saya masih meneliti yang sekarang itu jumlahnya yang sudah masuk kekami ada 22. RIPH mungkin hari ini sudah 30 sedang kami teliti sampai kesitu Pak. Itu salah satunya, tapi tadi hal menarik adalah 2 pemain lama, 6 pemain baru. Saya belum sempat meneliti apakah dia ada afiliasi seperti yang tadi disampaikan Pak Sudin, ini ganti baju dan sebagainya, karena saya harus segera menerbitkan PI, karenakan dihatinya sudah melonjak.

Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kaitannya kenapa harus di Rakortas, itu pun sudah berdebat antar pimpinan, tapi pimpinan kami masih tetap berusaha memprioritaskan bantu kementerian pertanian yang telah memberikan RIPH kepada perusahaan-perusahaan yang membantu petani.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi untuk Bulog itu, bulan Mei Pak.

#### **KEMENDAG (PAK OKA):**

Saya masih menunggu arahan Pak, karena arahnya tunda.

Baik. Yang kedua, kaitannya tadi sudah saya singgung sedikit tentang alur yang SPI. Jadi yang pertama, kepada mereka yang sudah mendapat RIPH, harus mengajukan secara online ke Inapre.

#### **KETUA RAPAT:**

Begini Pak, sebelum dilanjutkan Pak.

Bulog itu kan fungsinya untuk stabilisasi harga, ia kan. Jadi karena ini adalah hasil keputusan Ratas, maka itu adalah hasil keputusan pemerintah. Nah kalau sudah hasil keputusan pemerintah, idealnya seluruh lembaga-lembaga kementerian teknis, itu juga harus tunduk patuh kepada keputusan Kemenkeu, dari sisi teori, teorinya begitu. Saya ingat pada masa pemerintahan, sebelumnya juga ketika ada keputusan Rakortas, itu selalu dilaksanakan. Tetapi untuk Rakortas yang sekarang ini Menko Perekonomian, banyak yang tidak dilaksanakan oleh Kementerian Teknis. Jadi memang ini problem, problem soal koordinasi dan soal kepatuhan di dalam keputusan Rakortas, Kemenkeu, Perekonomian, bukan hanya soal ini Pak. makanya kalau kita

bicara soal stabilisasi harga, maka itu artinya pemerintah melakukan kebijakan diskriminasi. Kebijakan diskriminasi itu bukan sesuatu seluruhnya tidak baik, dalam rangka untuk keamanan negara, bisa melakukan kebijakan yang diskriminatif dalam kebijakan “diskriminasi harga” segala macam. Tol itu diskriminasi harga, uang tol itu diskriminasi harga.

Jadi memang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh internal Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog untuk melakukan koordinasi sekali lagi. Kalau soal stabilisasi memang tugas dan tanggung jawab dari pemerintah itu. Idealnya begitu sebenarnya. Kalau memang Pak Dirjen, Pak Oka menunggu arahan dari pimpinan, ia disampaikanlah itu, karena memang kalau bicara soal stabilitas itu harus dari hulu dan hilir, dari produsen dan konsumen dan seluruh stakeholder yang terlibat untuk menjaga pasokan itu diinternal pemerintahan itu juga harus bertanggung jawab. Kalau kemudian ada hal-hal yang soal komunikasi yang kurang baik, saya rasa itu bisa disampaikanlah karena kita berbicara soal lembaga bukan bicara soal pribadi pimpinan. Kalau bicara soal lembaga, menurut Profesor Jimly Asshiddiqie tidak boleh ada unsur subjektivitas pimpinan. Menurut hukum begitu, tapi ini kenyataannya tidak seperti itu. Tapi ya kami sarankan untuk selalu komunikasilah biar lebih bagus, karena nanti yang disalahkan juga pemerintah, tidak mampu untuk melakukan stabilisasi harga. Pemerintahnya siapa, yang salah kementerian teknis seluruhnya. Termasuk juga begitu.

Silakan Pak Oka.

#### **KEMENDAG (OKA):**

Masukannya akan kami catat dan akan kami sampaikan. Selanjutnya mungkin saya lanjutkan dengan alur sura persetujuan impor kenapa lama dan tidak. Jadi yang sudah mendapatkan RIPH mengajukan ke Inatrade, tim kami, tim teknis akan mengambil apakah memeriksa apakah yang mengajukan ke Inatrade ini sudah dapat RIPH atau belum. Bagaimana kami memeriksa bahwa dia sudah dapat RIPH, kita tinggal membuka portal INSW (Indonesian National Single Window) karena kementerian pertanian mengirimkannya melalui INSW. Sehingga kita cuplik dari situ. Apa informasi yang diterima, ia tadi, nama perusahaan dan sebagainya, termasuk INSW itu ada angka untuk yang sudah terkunci, tidak bisa dirubah 20 ribu atau 10 ribu ton. Jadi sudah terkunci. Jadi disitu yang pertama itu. Jadi yang pertama yang kita lakukan tentunya adalah RIPH, sehingga yang bersangkutan sudah dapat RIPH dan sudah dapat diproses lebih lanjut.

Selanjutnya tentunya ini secara normati dulu Pak saya sampaikan, bahwa staf kami akan memeriksa secara berjenjang, baik itu kepala seksi, kasubsi dan direktur sampa ke kami. Itu hal-hal yang terkait mungkin tingkat bawah itu adalah kaitannya dengan kelengkapan dokumen. Kalau yang bersangkutan apa lagi yang baru, kalau ketentuan yang terakhir adalah menguasai gudang penyimpanan yang cukup. Dibuktikan mungkin dengan bukti kepemilikan gudang atau bukti penguasaan gudang, maka akan dirobek dikembalikan. Kalau yang bersangkutan tidak memiliki alat transportasi, maka akan dikembalikan. Sehingga salah satu contohnya dari 8 yang kemarin sudah mengajukan, hanya 7 yang sudah lengkap, yang satu terpaksa dikembalikan, karena tadi ada salah satu persyaratan tidak dipenuhi.

Dari situ bagaimana prosedurnya, setelah kami nyatakan lengkap, makan dilengkapilah dibuatkanlah nota dinas khusus untuk produk-produk tertentu, sudah menjadi arahan pimpinan untuk mendapat approved, walaupun untuk bawang putih itu cukup direktur impor yang menandatangani persetujuan impor. Jadi walaupun

sudah lengkap, harus naik dulu kepemimpinan, saya arahkan, saya buat nota dinas arahan, saya periksa, saya meminta arahan pimpinan. Arahan pimpinan tentunya saya juga melihat lagi berbagai lagi pertimbangan, apakah laporan itu lancar atau tidak, performance sebelumnya karena seharusnya misalnya dia mengajukan 10 ribu, tapi performancenya hanya 37% salah satu contohnya itu bagaimana pertimbangannya, ada sampai kesana, kenapa nanti kuotanya turun dan sebagainya.

Jadi itu berbagai pertimbangan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan untuk diterbitkan, maka terbitkan dan proses penerbitan itu seketika Pak, kalau setelah mendapat arahan pimpinan. Jadi itu adalah prosedurnya.

Ijinkan saya menyampaikan juga, kenapa tadi disampaikan ada diskriminasi terhadap pelaku usaha dengan yang lain, baik dalam kuota maupun waktu. Kalau dari sisi kuota, kenapa si ini dikasih lebih, kenapa dari sisi waktu, kenapa ini lambat. Bahkan diakhir tahun, itu kita tapi secara prinsip Pak, semua yang mendapat RIPH kita terbitkan PI, hanya waktu dan itu yang berbeda, sehingga itu mempunyai alasan.

Saya ijin buat bercerita sedikit, kenapa alasan latar belakang begitu. Yang pertama pada tahun 2016 sampai pertengahan 2017, bawang putih ini tidak diatur. Jadi tidak termasuk pada komoditi yang diatur untuk mendapatkan RIPH, untuk mendapatkan persetujuan impor dan tata cara impornya pun ada persyaratannya. Kejadiannya itu adalah terjadi harga yang tidak terkendali bahkan pada saat itu diawal-awal 2017, di Kalimantan Timur di Samarinda, itu sampai harganya itu 135 ribu. Sehingga pada saat itu kami mengundang para pedagang, mengundang para importir, kita undang 100, yang datang 70. Kita ajak berpartisipasi untuk segera membantu pemerintah menurunkan harga apa masalahnya. Dari 70 itu kelihatannya sepakat.

Nah kalau yang mau bersepakat berpartisipasi, tolong sampaikan gudangnya dimana, siapa distributornya, nomor teleponnya berapa, memasok kepasar mana, sampaikan ada berapa stok dimasing-masing gudang. Didaftarkanlah masing-masing dikelola oleh, mohon ijin saya menyampaikan dirjen. Sehingga ternyata pada saat pelaksanaan waktu itu yang disebut adalah operasi pasar. Bagaimana operasi pasar itu dilakukan dengan target harga waktu itu melonjak jauh, dilakukan secara bertahap dari 35 ribu nanti satu minggu kemudian menurun menjadi 32 ribu, kembali normal dimaksimum 25 ribu. Kita harapkan begitu. Prosesnya apa yang terjadi, dari sekian pelaku pedagang dan importir itu yang hadir, yang berkontribusi untuk membantu pemerintah, karena himbauan, hanya 23. 23 ini membantu ini, tapi di lapangan pun banyak kendalanya, karena mereka tahu mau operasi pasar kemana, dia jual duluan sehari sebelumnya. Mekanisme operasi pasar pun karena ini baru Pak, baru mau diatur. Mekanisme operasi pun kita selalu mengevaluasi. Kita melakukan dagang sendiri kemasayarakat di depan pasar, padahal pedagang di dalam pasar sudah membeli bawang putih dengan harga 40 ribu, kita jualan tidak 20 ribu, bukan berhasil, malah kita ditimpuki oleh para pedagang, didemo oleh para pedagang. Sehingga banyak kendalanya. Dan tadi antar yang berpartisipasi dengan yang tidak berpartisipasi, ribut juga diantara mereka. Disitulah keputusan diambil diatur oleh kita tata niaga impor bawang putih. Tata niaga impor bawang putih itu sudah mulai diatur pertengahan 2017. Diaturlah importir siapa ini dan bagaimana.

Nah ada warna dari situ Pak, jadi begitu diatur, nah kami memberikan insentif kepada mereka yang berpartisipasi berusaha menurunkan harga, kepada mereka yang waktu itu 23 itu berpartisipasi. Karena timnya yang 243 orang, membawah daftar nama distributor baik itu minya, baik itu beras, baik ini-itu sampai nomor telepon. Manakala ada harga disatu pasar harganya diatas itu, maka sipetugas itu akan menelepon, kalau untuk beras ke Bulog. Ini kok di pasar ini tidak ada beras medium. Kalau bawang putih kedistribusian terdaftar di Dirjen PDN, segera pasok untuk

menjamin ada pasokan. Gula pun begitu, minyak goreng. Kita punya daftar siapa memasok ke pasar mana. Kalau di pasar, karena pada dasarnya dijual harga bawang putih 30 ribu, tapi bawangnya kosong. Nah kalau wabangnya kosong kita telepon supplyernya siapa. Sehingga itu perlu mendeploy 243 orang untuk memastikan kepastian pasokan dan mereka dilengkapi dengan pupuk, siapa subdistributornya, siapa pemasoknya, namanya siapa sudah ada dan mereka selalu dikawal Satgas Pangan. Kalau dia tidak mau memasok, nimbun. Ceritanya itu.

Nah kembali ke SPI, memang ada diskriminasi, tetapi dikaitkan dengan partisipasi mereka dalam membantu menurunkan stabilisasi harga. Walaupun pada saat itu pola stabilisasi harganya itu tidak efektif, karena datang kesatu pasar, truk mau masuk sudah dihadang oleh preman, preman yang oleh pedagang. Kenapa pedagang ini menghire preman, karena mereka sudah dipasok oleh yang tidak komperatif dengan harga yang tinggi sehari sebelumnya. Sehingga kalau ini, ini. Itu delamatis di lapangan. Sehingga kami harus selalu dikawal oleh Satgas Pangan. Satgas Pangan dan prosedurnya harus berpakaian lengkap tidak boleh menyamar. Nah jadi itu. Jadi salah satu kriteria, kenapa perusahaan ini dapat duluan, kenapa perusahaan ini dapatnya nanti, salah satu kriteria itu.

Salah satu kriteria lainnya adalah tadi Pak, kita berusaha berhitung belajar, karena ini beru mengatur bawang putih. Bagaimana mengatur kuota, kebutuhan 450 ribu ton yang penafsiran kami yang ditarik dari INSW itu yang berupa rekomendasi, pemahaman kami itu adalah 1 juta ton, padahal 450 ribu ton kebutuhan nasional atau 500 ribu ton. Saya memotongnya harus bagaimana Pak, tidak punya pola.

#### **KETUA RAPAT:**

Salah satunya Pak, asosiasi bawang putih itu ada 5. Pernah kita undang disini, ternyata khusus untuk komoditas bawang putih itu ada 5 asosiasi, salah satunya dikumpulkan saja mereka semuanya itu jadi satu. Kalau tidak mau, jangan dikasih RIPH, jangan dikasih SPI. Harus ada alat penekan dari pemerintah selaku negara untuk mengatur itu. Negara tidak boleh kalang dong, masa Pak Oka kemana-mana harus dikawal begitu keterlalu dong, tidak boleh begitu harusnya. Kopasus lagi yang mengawal. Jadi memang dulu pernah ada komitmen kalau tidak salah untuk melakukan penyatuan terhadap asosiasi itu. Nah misalnya begini, kalau tidak mau satu, ia sudah jangan dikasih, kasihkan Bulog saja semuanya. Kan bisa begitu nanti. Caranya mengancamnya begitu. Ini baru negara itu, hadir disitu. Kalau tidak, mungkin sampai kiamat begitu terus Pak. Tapi Bulognya siap atau tidak itu.

#### **KEMENDAG (OKA):**

Melanjutkan masalah kriterianya tadi Pak.

Jadi salah satunya juga, kami diinformasikan dengan berbagai informasi, tadi ada pada saat 2016 yang melonjak yang belum diatur itu, ada upaya-upaya untuk mengatur harga bukan dari dalam Pak, tapi dari negara pemasok. Dari negara pasok yang bekerja sama dengan kaki tangannya yang ada di Indonesia. Itu kita deteksi, sehingga kita perlu penelitian, yang ini yang terjadi diindikasikan seperti ini kita tunda dulu, kalau memang terbukti kita bisa menyakinkan bahkan pemasok utamanya itu sudah datang menghadap Pak menteri. Yang kita curigai dia yang menjadi yang mempunyai kaki tangan untuk mengajak, mengatur harga bawang putih kerah yang Pak menteri mau, tapi lama-lama diatur dia. Nah itu. Artinya salah satu dari kita mencari kaki tangan dia. Kalau kaki tangan dia itu terdeteksi oleh kita, kita jangan terbitkan dulu PI, nanti dulu saja, yang lalin dulu yang. Karena kita bisa indikasikan,

inilah pemain-pemain yang mengatur harga. Jadi kriterianya yang ditingkat kami bukan ditingkat teknis kepala seksi, kalau kepala seksi ada kelengkapan tidak atau tidak, kasubdit itu dia melaporkan tidak, lihat kinerja tahun lalu impornya berapa persen, jadi yang normatif itu. Nanti ditingkat kami meneliti sampai kesana Pak dengan berbagai.

#### **KETUA RAPAT:**

Atau dibuat begini Pak, menurut teori ekonomi itu pakai system persaingan pasar sempurna. Jadi persaingan pasar sempurna itu adalah para pelakunya dibanyakan asja. Saya seperti beras, pelaku beras sangat banyak. Jadi proses untuk melakukan kartelisasi, melakukan upaya untuk monopoli, monopsoni, itu relatif tidak ada. Tetapi kalau pelakunya sedikit, maka peluang untuk melakukan monopoli, monopsoni, oligopoli itu ada. Jadi saran saya memperbanyak pelaku sehingga bisa dikontrol pemerintah. Jangan seperti kredit Pak. Kalau di Bank itu lebih baik mengasi pelaku usaha yang sedikit tapi besar-besar, dari pada banyak tapi kecil-kecil. Nanti urusannya susah. Kita bicara sosial ya Pak ya. Jadi selaku pelayan masyarakat, tugas pemerintah adalah menghilangkan itu. Jadi kalau memang tidak bisa diatur, sudah dikasih Bulog saja. Itu saya rasa.

#### **KEMENDAG (OKA):**

Baik Pak.

Jadi masukannya akan kami catat, tentu bagi kami siapa yang dapat RIPH itu yang harus layani Pak intinya. Jadi harus memang banyak. Tapi tadi saya sampaikan, latar belakang kenapa terjadi diskriminasi terhadap importir yang satu, kenapa duluan dan sebagainya. Yang memang sekarang kami keberatannya adalah tadi, kuota 1 juta, kami harus mengatur sendiri Pak, 450 ribu. Kita putar-putar pun susah, kapasitas gudang, kapasitas ini tetapi rumit Pak kita mengatur itu karena kapasitas gudang bisa, saya habis setiap bulan kok dan sebagainya. Tapi kami secara prinsip memperhatikan tadi. Pasa awalnya tadinya kalau tidak tahu bahwa yang ditanam itu buat bibit, tapi langsung dikonsumsi tentunya kita harus memperhatikan petani tersebut. Kalau sekarang sudah paham. Tapi intinya memang terjadi Pak, kami akui adalah kepada perusahaan-perusahaan tertentu pada perbedaan perlakuan baik dari volume maupun waktu. Tetapi kalau dari sisi volume, kita tidak pernah menambahkan dari apa yang tercantum di INSW usulan, justru kita mengurangi dengan arah ke 450 ribu. Pola perhitungannya peraturan menteri perdagangan ini baru satu setengah tahun, setengah tahun baru dibangun dengan tadi dan selanjutnya kita akan melakukan tertib administrasi dengan Pak.

Demikian Pak untuk keterangannya.  
Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Dari Bulog belum ya tadi.  
Silakan.

#### **F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Pimpinan-pimpinan.

Yang terakhir tadi soal keterangan bahwa ada perbedaan perlakuan. Kalau boleh tahu melalui Pimpinan, ingin menanyakan kriterianya apa atau mungkin ada alat ukurnya itu, kenapa terjadi perbedaan.

**KETUA RAPAT:**

Alat kurunya verifikasi administrasi tadi ya.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Hanya itu saja Pak?

**KEMENDAG (OKA):**

Kriteria Pak ada. Jadi untuk tadi kenapa duluan, kan kriterianya kami mendahulukan yang berpartisipasi. Yang 23 duluan dong, yang lain malah mengganggu, ia nanti saja dulu. Mendahulukan yang berpartisipasi. Kalau masalah kuota, kenapa ini besar, karena semua importir rata-rata maunya besar Pak, sehingga kita atur dengan, saya belum tahu Pak berhitung dengan kapasitas gudang, dengan apa, kita lakukan perhitungan secara mencoba melakukan pendekatan. Tetapi tadi, kami juga memperhatikan bahwa yang bersangkutan ada wajiba tanam. Tetapi Pak mohon juga pertimbangan, kenapa 20 ribu jadi 10 ribu, 1 juta Pak, mereka artinya itu 20 ribu itu adalah bagian dari pada yang 1 juta. Karena kebutuhan kita 500 ribu ia saya kasih 10 ribu. Itu Pak. Kalau yang kecil-kecil Pak yang 2 ribu ton, tidak pernah kita kurangi langsung kita kasih, ada buktinya. Kalau memang kecil-kecil Pak. Karena dari kapasitas gudangnya besar malah, tapi dia mengajukan kok 2 ribu, mungkin pertimbangannya enamnya hanya sekian itu kan. Tapi artinya tapi ada yang juga besar, tapi kapasitas gudangnya kok kecil. Itu jadi pertimbangan mengurangi. Tetapi kalau dari waktu, itu saya dahulukan yang berpartisipasi. Salah satu contohnya pada tahun 2019 ini, partisipasi dalam pasar pemerintah Pak, membantu pemerintah.

Nah kami untuk melakukan upaya stabilisasi harga yang bergejolak di 2019, saya perhatikan kementerian pertanian telah melakukan operasi pasar. Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ke daerah membawah distributor yang masih punya stok di gudangnya untuk operasi pasar. Tetapi kelihatannya pola operasi pasar dengan begitu, selain tadi benturannya tadi, tadi sudah disampaikan. Kalau sudah tidak ada benturan, yang mengantri itu pedagang, bukan konsumen, karena aturannya beli satu karung. Pada saat itu operasi pasar turun, tapi besok naik lagi ke balik lagi. Sehingga kami duduk bersama dengan harus ada bestmark harga. Masyarakat harus punya pilihan, kemana harus lari untuk membeli bawang putih yang terjangkau, pada saat itu kami undang Aprindo (Asosiasi Ritel Modern). Yang kita anggap bisa menjadi besmark untuk harga bawang putih dan bisa mengget harga di pasar tradisional turun, yang targetnya tadi 30 ribu, tetapi kita duduk bersama. Pada saat itu juga ritel modern itu sudah menjual dengan harga 80 ribu Pak, karena mereka sudah membeli 50 ribu.

Nah kami ajak, kami duduk bersama 8 Mei 2019 saya dan Ibu Dirjen PDN memimpin mengajak mereka, ini ayo ritel modern kita bantu pemerintah untuk membantu menurunkan harga. Berapa yang tidak mungkin Pak dari 80 ribu kita drofkan langsung keharga 25 ribu, ada 60 ribu, ada yang 40 ribu. Kita akhirnya kami pemerintah meminta untuk puasa dan lebaran ini tolong dijual dengan 35 ribu. Baik kami bantu dan itu berlaku satu harga secara nasional, semua Alfamidi, semua tidak boleh ada yang menjual lebih dari 35 ribu. Sehingga Ibu-ibu yang akan mencari

bawang putih tidak perlu kepasar tradisional, tapi cukup ritel modern dapatlah dengan harga 35 ribu. Kan wajib diumumkan. Kenapa harus diumumkan. Dan pengumuannya pun bukan dijual harga 35 ribu, tapi nanti stoknya koson, kita atur harus tersedia bawang putih dengan harga 35 ribu. Kita minta kerelaan mereka untuk kontribusi dalam menurunkan harga. Disambut baik dan sekarang semua secara nasional diritel modern 35 ribu. 35 ribu itu supaya tadi kalau diritel modern memang harus lebih tinggi dari harga yang diharapkan di pasar tradisional. Disambut baik. Hanya apa yang disampaikan Aprindo, Pak tolong jamin pasokan kami, saya beli dari mana, orang kemarin saya baru beli dari 40 ribu, kembali yang 8 yang sudah dapat RIPH yang sudah ada PI, saya ajak kumpul, pasok. Kebutuhan mereka hanya 500 ton/bulan.

Kebutuhan Aprindo secara nasional 500 ton perbulan. Sementara yang masuk sudah 115, bulan ini saja itu 63 ribu. Jadi hanya sedikit sekali untuk ke Aprindo. Tapi kalau mereka sepakat bahkan di 35 ritel modern, itu akan menggeret pasar tradisional. Maka pola operasi pasarnya itu yang kita rubah. Sementara saya tugaskan siimportir melalui distributor, memasok kepedagang dengan harga target harga mereka mempunyai rantai distribusi Pak. Menjual dengan harga tertentu dengan target harga ditingkat konsumen 32 ribu di pasar tradisional. Ini importir yang ini juga, mereka berbicara dengan distributornya, memasok harga, pasti nakal Pak, karena begitu tadi dijual oleh kepedagang 29 ribu, dia tidak menjual 32 ribu, malah 38 ribu. Sehingga diperlukan harga stabilisator ini dari ritel modern dengan harga 35 ribu, sehingga di pasar modern turun menjadi di bawah 35 ribu. Dan ini setelah lakukan itu oleh ritel modern, grafiknya langsung turun. Harganya memang ada di pasar modern yang masih menjual, tapi tidak lebih dari 40 ribu, tidak ada gejolak lagi diatas 60 ribu.

Itu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan.

#### **KETUA RAPAT:**

Harga bawang putih dengan bawang putih lanang itu ada perbedaan tidakya. Bisa dijelaskan.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, saya interupsi.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Sudin.

Kita rapat sampai Jam berapa ya, Jam 3 ya. Ada Kemenko, Ratas lagi Pak. Bisa tunggu 10 menit lagi ya.

Silakan Pak.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Yang ingin saya tanyakan, kenapa harus ada operasi pasar, kalau mata rantai distribusinya jelas, stoknya bagus, catatan data pangan jelas tidak perlu ada operasi pasar, operasi pasar itu ibarat orang bagaimana menyebutkannya ya. Itu kan cuma sesaat, dua tiga hari, seminggu naik lagi. Kalau rantai distribusinya jelas, tidak ada perlu operasi pasar Pak. Contohnya nanti bulan 8, bulan 9 mau ada Idul Adha. Seberapa banyak ternak disiapkan untuk dipotong, untuk dikurban. Dari sekarang

sudah harus tahu dong, berapa banyak. Berapa banyak kebutuhan daging potong, berapa banyak kebutuhan buah dan lain-lain pada nanti Idul Adha. Kalau datanya ada, datanya jelas, inikan ibarat, mohon maaf ini, ibarat dokter tidak sekolah, mengaku dokter, tapi tidak sekolah, sakit apa, badannya sakit, dikasih obat ini. Oh, ternyata tidak manjur, ganti lagi ya besok minggu depan kasih ini, kasih Panadol, kasih obat nanti sakit, ujung-ujungnya Pasiennya mati. Ini lho ketua. Kalau datanya lengkap, semuanya lengkap, ini kan mohon maaf ini Pak, ini kan seolah-olah dibuat, dibuat sedemikian. Contoh dua tahun lalu Imlek, tidak ada buah dari Cina. Itu Bapak pasti tahulah, kalau Bapak pakai hati nurani apa sebabnya Bapak tahu.

Satu lagi pertanyaan saya Pak Dirjen. Berapa RIPH yang sudah masuk keperdagangan belum diterbitkan SPI. Saya setuju dengan usulan Pak ketua tadi. Perbanyak saja barangnya. Kalau barangnya banyak, banjir di lapangan, tidak mungkin harganya naik. Jadi jangan RIPH diperlambat, SPI nya diperlambat, ini akibatnya apa, barang kosong. Ini hukum dagang berlaku Pak. Kalau perlu setiap provinsi jadi importir Pak, kasih ijin importir semuanya, tujuannya apa, supaya harganya turun, kasihan dengan masyarakat Pak. Karena kita semua tahu bawang putih di Cina tidak sampai 1 dolar Pak. Disini rakyat harus menanggung derita membeli 80 ribu, terutama wilayah seperti wilayah yang kemarin yang kami kunjungi Pak dirjen di Palembang. Konsumsi bawang putih mungkin paling besar Palembang. Ia nanti tolong pertanyaan saya nanti di jawab. Yang sudah RIPH keluar, suda sampai dipedagangan, berapa banyak yang SPI nya yang belum dikeluarkan. Saya tidak mau tahu itu importir siapa, apa, apa, apa.

Itu saja terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Sudah cukup anggota ya. Dari Bulog tadi belum.  
Pak Oka dulu ya.

#### **KEMENDAG (OKA):**

Dua pertanyaan tadi, yang pertama operasi pasar. Saya setuju Pak. Jadi mekanisme operasi pasar tadi yang disampaikan, bahwa itu seperti menggarami air laut Pak. Saya setuju. Makanya pada mekanisme yang tahun 2019, kami memperbaiki dengan mengajak ritel modern yang pasokannya sekitar 3 atau 4% dengan menjadi bemsart 35 ribu dan memaksa operasi pasar yang dilakukan oleh para importir ini tidak berdagang sendiri, tapi memasok kepedagang melalui rantai distribusinya dengan kesepakatan harga. Jadi bukan mekanisme operasi pasar yang kami lakukan lagi, tetapi meminta pada importir untuk memasok dengan harga yang memang kita targetkan dan itu mekanisme ini akan kami cabut akan kami kembalikan setelah dua bulan puasa dan lebaran, dimana RIPH dan PI sudah akan terbit cukup untuk memenuhi sampai akhir tahun.

Yang kedua, tadi berapa banyak RIPH. Kalau cerita 2017, tadi hanya ada masalah diskriminasi waktu, ini kapan, ini kapan. Secara prinsip, setiap yang mendapat RIPH itu kita terbitkan, kecuali yang ada catatannya. Catatannya itu ada catatan dari KPPU dia sudah putus, melakukan harga sebelumnya, catatannya tadi dia juga diindikasikan mempunyai afiliasi dengan yang kita indikasi mengatur harga itu kita kalau itu terbukit kita, jadi memang ada tidak keluar. Dan ada juga yang tidak keluar karena terlambat mengajukan. 2018 pun kita lakukan itu Pak, semua persetujuan impor keluar dari yang diusulkan, diusulkan 77, keluar 73, yang karena ada catatan. Tetapi tadi waktunya saja yang berbeda-beda, karena yang sebagianitu



berpartisipasi yang sebagian tertib, tapi tidak berpartisipasi, yang lain nakal. Misalnya begitu Pak.

Yang sekarang, dari 30 RIPH yang sudah diterbitkan, sekarang sudah 28 yang terbit Pak, tinggal 2. Bahkan dari sisi volume, kita tidak kurangi secara signifikan. Saya khawatir karena sekarang itu sudah mencapai kurang lebih 230 ribu ton Pak, hanya 22 perusahaan yang saya hafal. Kalau 28 saya tidak tahu berapa itu. Jadi sudah banyak ini Pak. Dari 30, 15 persetujuan impor sudah terbit, pengurangannya Pak, hanya 5 ribu dari kuota. 11 permohonan sudah masuk dalam proses terbit, mungkin hari ini terbit semua, yang dua permohonan di rollback, jadi dikembalikan, karena macam-macam tidak lengkap persyaratan atau apa. Begitu melengkapi persyaratan, kita akan kami terbitkan. Intinya itu. Maaf Pak, dari 15 yang saya hafal dulu Pak. Ini jumlahnya belum ada hitungannya, karena yang 11 belum terbit. Yang 15 terbit, yang itu berkisar 220 ribu ton, baru 15 Pak. Kalau importirnya ada 80, nah ini berapa, apakah kita keluarkan semua sementara kebutuhan kita. Tadi sepakat kita keluarkan 600 ribu, cuma saya harus membagi-bagi motong yang mana dan berapa tetap subjektifitas. Ia tapi intinya itu Pak. Jadi saya menjawab pertanyaan Bapak, 15 sudah terbit, 11 dalam proses hari ini mungkin terbit, 2 dikembalikan nanti setelah lebaran baru terbit atau Jumat terbit bisa, kalau dia segera melengkapi pada hari Jumat.

Demikian Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Bulog yang terakhir, terus setelah itu kita akan buat kesimpulan rapat ini.

#### **PERUM BULOG:**

Mohon Ijin Pak Pimpinan.

Kalau bisa dari perdagangan tetap tunggu sampai kami selesai mendengar jawaban kami. Saya akan awali jawab tadi pertanyaan Pak Sudin, mengenai berapa piutang gula. Piutang CSHP gula kami 1,9 triliun. Telah dibayar oleh Kemenkel 350 miliar. Saat ini tagihan sudah masuk ke Kemendag dana dalam verifikasi BPKP 1,5 triliun. Artinya yang 1,5 triliun ini yang masih tertunda plus bunga adalah apa yang menjadi bahan kami, oleh karena itu kami mohon bantuannya kepada Kemendag dan semua yang terkait agar bisa terjadi percepatan.

Selanjutnya kami mohon ijin menjawab.

#### **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan Interupsi.

Jadi tidak ada kerugian disitu. Karena selisih harganya itu hampir 2 ribu lebih bu.

#### **PERUM BULOG:**

Betul Pak, karena CSHP Pak. Jadi memang akan diganti negara. Tetapi masalahnya dalam kurun waktu dana itu belum diganti, kami bayar bunga pinjaman bank. Nah problemnya Pak, seringkali antara misalnya katakanlah tagihan kami masuk bulan Januari, tetapi dalam prosesnya itu baru dibayarkan bulan September. Nah bunga dari Januari-September saat ini belum diserap dalam pengembalian itu. Jadi itu memang masalah teknisk yang memang perlu lebih ya itu Pak. Jadi bunga

dalam kurun waktu tertentu, itu yang tidak terbayarkan. Jadi memang itu PR yang cukup harus kami lakukan untuk duduk lebih dalam lagi dengan kementerian keuangan untuk merapikan apa saja yang seharusnya bisa kita tagih. Jadi ini PR Pak, PR yang kami akan lakukan sebagai catatan. Dari dua minggu lalu juga hal yang sama.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan sedikit lagi.

Bu, ada tidak rencana bisnis yang lebih besar di Bulog akan datang.

**PERUM BULOG:**

Ada Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Jangan ada, tapi tiba-tiba cuma minta fasilitas, itu bukan rencana bisnis bu.

**PERUM BULOG:**

Tidak Pak. Insya Allah tidak.

Kami ada RJP dimana selain sampai 5 tahun kedepan bagaimana strateginya semua kami sudah ada Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Terima kasih Bu.

**PERUM BULOG:**

Selanjutnya injin kami mungkin membahas sedikit apa yang disampaikan dari Kementerian Perdagangan tadi Pak. Saya mulai dengan kita sepakat, Bulog ini siapa yang membuat, Bulog ini negara yang membuat Pak. Dengan sederhananya ini sebenarnya kita masih mau ada Bulog atau tidak. Kalau memang masih mau ada Bulog, seharusnya bias diptimalisasi. Tadi disampaikan bahwa pada saat tidak mendudukan kepada Bulog, nanti ada yang merasa terdiskriminasi. Pada sebenarnya permintaan 100 ribu ton bawang putih yang kami lakukan dalam Rakortas tanggal 18 Maret, tidak ada urusannya dengan tahun 2018. Itu urusan yang lain. Waktu itu karena tugas Bulog adalah menjaga stabilisasi harga, kami melihat saat itu harga mulai naik. Bahkan Pak, waktu itu akibat dari ini, diakhir Maret alal April, kebetulan rumah saya di daerah sana Pak. Pasar Kebayoran Lama, Joglo dan Mayastik Pak, bawang putih sudah 90 ribu. Itu belanja rumah ya. Nah jadi waktu kami meminta 100 ribu agar kami bisa segera membantu negara untuk stabilisasi. Itu Pak tujuannya. Jadi seharusnya menurut hemat kami tidak perlu dipertimbangkan kaitannya dengan 70 yang sudah dapat ijin dan sebagainya. Ini simpli harga sudah mulai bergerak, negara punya yaitu Bulog untuk menstabilkan harga, harusnya menurut hemat kami kasih Bulog 100 ribu dan kami bergerak langsung stabilisasi. Kira-kira begitu.

Nah lalu kalau kami katakanlah begini, tadi dikatakan sudah ada 600 ribu ton diberikan ijin. Kalau menurut saya pada waktu itu cabut saja ijinnya, kalau memang mereka terbukti akhirnya tidak berhasil. Tadi Bapak katakan stok ada, tapi terus naik.

Pertanyaanya adalah apakah mereka sengaja tidak mau lepas. Ketika kemudian bawangnya sudah ada tumbuhannya sudah mulai tumbuh, artinya kan jelas ada tidak mau melepas pada saat itu atau jangan-jangan fiktif, mungkin, tapi saya tidak tahu. Intinya negara harusnya bisa intervensi saat itu dan negara punya, yang namanya Bulog. Itu Pak. Sehingga menurut hemat kami, lain kali kasih saja dulu ke Bulog, kalau akhirnya keluar swasta, ia bilang, Bulog stop. Gula kami begitukan. Begitu ada masalah, ia sudah stop dulu. Stop dulu ini, stop dulu itu. Bisa, karena kami adalah nya negara.

Lalu apakah kesannya Bulog tidak bagus kinerjanya, menurut saya kita ini bukan perusahaan baru. Tadi dikatakan ada kinerjanya tidak bagus, karena perusahaannya baru. Bulog jelas bukan perusahaan baru. Maksud saya, kalau diperbandingkan kenapa tidak diberikan kepada Bulog. Nah mengenai apakah menjaga harga, pasti kita bisa, negara dong kita tetapkan. Lalu ada satu anomali menurut hemat kami, mohon maaf bertanya. Kita punya pasar tradisional yang begitu giat diperkuat, dirapikan dalam 5 tahun terakhir ini. Dimana targetnya adalah 5 ribu pasar yang dirapikan di luar pasar-pasar tradisional yang ada di bawah kementerian itu. Lalu kok stabilisasi harganya melalui Alfamidi, tadi contohnya. Harusnya kan pertama di pasar tradisional, kita tahu di daerah mayoritas masyarakat masih mengandalkan pasar tradisional untuk kebutuhan pokok mereka. Dan itu mohon ijin Pak, sewaktu-waktu kami akan sampaikan materi lebih lengkap. Itulah kenapa kami mengubah pola TPKA diawal kami sudah evaluasi diakhir tahun lalu, dan tahun ini kami mengubah, dimana TPKA kami jadikan nanti Insya Allah mekanisme stabilisasi harga berbasis pasar tradisional, yaitu Bulog di pasar tradisional tanpa margin. Jadi itu langsung.

Nah mengenai oleh karena itu Pak, menurut hemat kami juga, saat ini kalau dilepas pesaing pasar sempurna, mungkin masih sulit Indonesia saat ini, karena yang istilahkan Bapak Dirut kami sebagai kartel. Bagi saya sederhana bahwa kartel itu adalah swasta yang bersatu menghadapi pesaing yang mendistabilisasi mereka dalam hal ini pesainnya adalah perangkat negara yaitu Bulog. Maka bila kami boleh memberikan usulan, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadikan single importir. Bulog mampu kok mengelola 600 ribu, mampu mendistribusikan kepada mereka-mereka juga, tatapi dengan secara lebih terkendali. Dengan menjadi single importir, kita bisa tetap melakukan pelayanan terhadap 70 perusahaan yang ada di daftar Bapak, minus yang blacklist dan kita hadir di pasar. Sebagai dari mata, mohon maaf Pak diluar direktur, sebelum Direktur Bulog, saya juga termasuk adalah aktivis.

Saya mengamati Perum Bulog ini dibentuk tahun 2003. Dalam kecepatan sangat tinggi kita masuk kepersaingan bebas. Rontok seluruhnya yang tadinya dikendalikan Bulog, dia ambil alih oleh swasta. Tetapi 15 tahun kemudian, tahun ini Pak, terbukti swasta mungkin tidak mau atau tidak berhasil menjaga stabilisasi harga, buktinya bawang putih kemarin. Jadi sudah terbukti kok Pak, swasta selama 15 tahun tidak berhasil mengakses ke daerah yang paling blusuk yang paling puncak, Mentawai di Papua tidak berhasil menjaga aksesibilitas, menjaga keterjangkauan harga dan terbukti kemarin stabilitas. Jadi mungkin dimulai dari bawang putih ini Pak, menjadi pelajaran kita semua bagaimana kita bergandeng tangan. Kementerian Perdagangan punya Bulog dan kami siap bekerja untuk membantu kementerian perdagangan. Monggo Pak dipertimbangkan.

Terima kasih Bapak-bapak.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Pimpinan.

Ijin saya mengapresiasi Bulog. Kalau mau bergandengan tangan perdagangan, taolong satu mimpi. Jangan bergandengan tangan, tapi mimpinya berbeda-beda. Itu ya bu ya. Terus kalau menjelaskan tadi jangan ke Pak Sudin saja, saya juga ingin dilirik sama Ibu juga bu. Pak Sudinnya keluar, dilirik terus. Pak boleh tepuk tangan untuk Bulog Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sudah satu kasur, tapi memang beda mimpi.

Kalau soal kartel kita boleh berdebat soal definisi. Jadi maksudnya itu, jadi jangan selalu menuduh para pelaku usaha dan istilah-istilah hitam, sehingga itu mengganggu ketertiban dalam berusaha. Kalau soal kartel, kan sudah ada Satgas Pangan bu, tangkap saja, Komisi IV akan mendukung kok. Tapi ya selama itu belum ada, jadi agak susah bicara secara di lapangan, tapi juga jangan salah tangkap, karena salah definisi. Ingat tidak waktu itu, ia kan. Jangan diungkapkan kasusnya seperti apa, karena salah definisi karena salah tangkap. Tidak boleh juga Ibu itu, karena itu bisa melanggar Undang-Undang.

Jadi Bulog sudah berusaha keras Pak untuk minta penugasan, tinggal dari Bapak Kemendag dari Pak Oka untuk memberikan penugasan. Jadi intinya adalah kita ini berusaha dengan Pemerintah dengan DPR agar proses dalam pangan ini sesuai dengan aturan yang dibuat menjaga ketersediaan, ketercukupan, keamanan dan stabilitas harga dan pasokan. Intinya disitu. Kalau diinternal sendiri sudah kasus kasus, sudah satu mimpi, saya rasa tidak ada hal yang perlu diperdebatkan secara serius dan nantinya akan mendapatkan sebuah kebijakan yang sangat baik, dan memberikan manfaat yang sangat bagus buat masyarakat Indonesia, apapun pilihannya.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Pimpinan.

Sebelum kesimpulan, tadi ada yang menarik dari 30 RIPH.

**KETUA RAPAT:**

Sudah Jam 3 ini Pak.

**F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Ia, ia sebentar. Ijin Pimpinan.

15 sudah keluar, yang 11 belum hari ini. Jadi saya minta ketegasannya untuk timelinenya itu jangan sampai nanti timbul diskriminasi lagi itu. Kalau sudah anggapan masyarakat berkembang secara liar, nanti ada akses yang lain, marak calo dan sebagainya. Kalau yang ada calonya bisa cepat dan sebagainya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke terima kasih.

Kalau sudah tidak ada lagi, ada lagi Ibu Judin.

## **DIRAKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Sudah tidak ada diskriminasi Pak, ia juga mungkin berarti Bulog dipertimbangkan kembali, hasil rakortas bahwa akan diberikan kuoat.

## **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Ini usul saya. Kalau tadi Ibu mengatakan diskriminasi, Ibu juga wajib tanam, itu baru pers, tidak ada diskriminasi atau diberikan dispensasi tidak tanam, tapi menyetorkan bibit ke Dirjen Hortikultura. Itu baru tidak diskriminasi pers, pemainnya sama. Mungkin kalau Bulog mau tanam kesulitan, ia setor saja bibit dari pada dirjen hortikultura mengeluarkan dana lagi dari APBN. Itu pers ia kan. Jadi Bulog juga jangan mau menang sendiri, untung sendiri. Itu juga bagus pimpinan.  
Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Ia Bulog itu bisa bekerja kalau ada penugasan dari pemerintah. Kalau tidak ada penugasan dari pemerintah tidak akan bisa bekerja. Contohnya seperti ini beberapa hal yang berkaitan dengan keputusan Rakortas kalau juga tidak ada penugasan, secara teknis tidak bisa jalan. Oke ya, cukup ya.

Kita langsung kekesimpulan.  
Pak Agung silakan.

## **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Jadi begini Pak, kalau saya menyimak apa yang disampaikan Pak Dirjen diskusi kita, sepertinya memang harus kita bedakan Pak. Kalau alasannya untuk stabilisasi harga dan stabilisasi pasokan, saya rasa penugasan bisa kita lakukan kepada BUMN. Ini tidak hanya dengan Bulog. Jadi satu contoh misalnya kita juga pernah memberikan penugasan ke Bulog untuk jagung, kita tidak menawarkan keswasta yang lain. Pada saat kita mengimport beras diakhir tahun 2017, kita juga tidak menawarkan swasta, semuanya penugasan kepada Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan, dalam rangka stabilisasi harga. Kalau normal-normal saja Pak, tidak dalam rangka stabilisasi sekarang ini misalnya, harga bawang putih sudah 30 ribu, normal-normal saja hanya memelihara, tidak perlu penugasan kepada Bulog. Tapi pada saat 70 ribu, 80 ribu kemarin, memang harus ada penugasan agar bisa meredam secara cepat.

Mengenai kewajiban lain agar pers, saya setuju dengan Pak Sudin. Memberikan benih kepada Dirjen Hortikultura. Salah satu kompensasinya adalah itu. Tapi keterlibatan BUMN Pak.

Saya rasa itu Pak.  
Terima kasih.

## **F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan.

Menanggapi Pak Agung, penugasan waktu import jagung, Pak Agung tahu Bulog import tidak atau Bulog cuma mendapatkan fee, Bapak tahu. Saya masih ingat

waktu rapat disini waktu itu Dirutnya Pak Jabar, bukan impor. Jadi kalau Bapak tarik kebelakang, nanti kita bongkar-bongkar lagi, tidak enak. Iya Pak ya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya pokoknya kita masih sangat perlu Bulog ya. Apakah nanti Bulog itu oleh pemerintah yang baru dijadikan sebagai lembaga badan pangan nasional atau dari badan ketahanan pangan nanti diangkat badan pangan nasional yang punya kewajiban bertanggung jawab kepada Presiden langsung dan diberi hak untuk membentuk BUMN-BUMN, apakah nanti Bulog bagian dari itu, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, karena sudah molor Oktober 2015 sampai sekarang belum dibentuk.

Oke kesimpulan ya.

Kalau soal peran swasta dan BUMN, itu kita perlu melihat buku-bukunya Pak Tantri Abeng itu, karena beliau yang promotor perlu adanya Meneg BUMN itu beliau. Saya pernah ikut kuliahnya bagus sekali.

#### **Kesimpulan/Keputusan:**

1. Komisi IV DPR-RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog dalam upaya menjaga dan terus mengawal ketersediaan dan stabilitas harga pangan ditingkat produsen, hingga konsumen terutama menjelang lebaran. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memantau harga ditingkat petani, nelayan dan pembudi daya ikan dalam menentukan harga acuan pangan dan harga eceran tertinggi, sehingga tidak merugikan produsen dan tidak membebani konsumen.

Ini normatif ya.

Pemerintah kompak ya.

#### **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Setuju.

Anggota?

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Iya kalau pemerintah kompak ini kan enak Pak, cepat.

2. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi integrasi dan sinergitas dalam menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan pokok, sehingga pangan yang diterima oleh masyarakat tersedia dengan cukup, tepat waktu, berkualitas, terjangkau, aman dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa merugikan petani dan peternak sebagai produsen.

#### **KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

Anggota?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memperpanjang program kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga KPSH dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional.

Pemerintah membatasi sampai tanggal 31 Mei. Nah ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas, usulan dari Bulog tadi, sangat bagus juga itu, agar ada koordinasi diinternal kementerian teknis pemerintah.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Anggota setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog sesuai keputusan Rapat Kementerian Terbatas Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, terkait dengan penugasan importasi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. ketersediaan, ketercukupan dan stabilitas harga pangan.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Saran Ketua, dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

**KETUA RAPAT:**

Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog sesuai keputusan Rapat Kementerian Terbatas Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, terkait dengan penugasan importasi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. ketersediaan, ketercukupan dan stabilitas harga pangan. Sebenarnya ini jangan ditulis karena memang beberapa waktu lalu hasil-hasil dari rakortas itu operasional, sehingga menyebabkan Bulog tidak bekerja. Ini hanya suport moral saja sebenarnya Pak Oka.

Silakan.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Pak mungkin ini jadi kalau pasokan itu bukan stabil, tetapi menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

**KETUA RAPAT:**

Menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Sip.  
Pak Agung?

Untuk menindaklanjuti hasil rakor. Untuk menindaklanjuti keputusan rakortas terkait dengan penugasan kepada Perumb Bulog.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Untuk menindaklanjuti.

**KETUA RAPAT:**

Nah makanya mau lex spesialis atau umum.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Sebelum rapat koordinasi, hasil.

**KETUA RAPAT:**

Ini drafnya umum, bukan lex spesialis.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Pimpinan, kalau seperti ini kelihatannya Kementerian Perdagangan tidak menindaklanjuti keputusan dari Rakortas. Padahal tadi hanya satu itu saja, tidak semua dan hanya kebetulan bawang putih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi lex spesialis saja. Oke.

Jadi Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah ke Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Perum Bulog, terkait dengan penugasan khususnya. Itu saja. Ya, pakai khususnya, jangan pakai khususnya. Bawang putih dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Jangan pakai pangan kalau begitu, titik saja.

Saya ulangi. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah ceki Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti hasil Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Perum Bulog terkait dengan penugasan importasi bawang putih dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Ketua.



**KETUA RAPAT:**

Silakan.  
Setuju, Ibu Hidayatai, Pak Oka cukup ya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan,

Harusnya ditambahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Pertanian. Kalau tidak, ini ada keputusan Bulog tidak ada wajib setor bibit bawang putih atau tanam. Harus dicantumkan juga, supaya jelas, masalah ini dokumen negara ketua.

Setuju tidak Pak Agung?

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Kalau penugasan tidak perlu tambahan itu Pak Sudin.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Jadi kalau penugasan, terus bebas. Diskriminasi dong.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ada di Pasal 19 Permentan nomor 38 tahun 2017 Pak. Syarat-syarat BUMN melakukan penugasan dalam rangka stabilisasi berbeda dengan syaratnya impor wajib tanam 5%.

Terima kasih.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Sekarang harganya sudah stabil belum?

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Harga sudah turun Pak.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Sudah stabil, berarti bukannya penugasan.

**KETUA RAPAT:**

Nanti bulan Juli naik lagi.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Itu beda lagi. Kalau perlu setiap minggu membuat rakortas, walaupun tidak dijalankan ketua.

**KETUA RAPAT:**

Intinya kan begini Pak Sudin. Jadi ada kewajiban dari Bulog untuk melakukan memang ada diskriminasi kebijakan betul karena ini BUMN dalam rangka stabilisasi. Tapi untuk memberikan komitmen moral kepada Bulog untuk membantu petani bawang putih terkait dengan pengadaan benih itu perlu ada tidak dari Bulog.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Pak begini, kalau kami ada penugasan, pada saat kemudian sekarang misalnya sudah stabil, tapi kemungkinan diwaktu kedepan akan ada lagi distabilitas. Nah dengan kami sudah diberikan ijin dari sekarang, kami atur sepanjang tahun Pak. Seperti daging misalnya, tidak sera merta, ketika kami diijinkan impor 100 ribu misalnya, lalu semuanya kemudian kami importasi sekaligus. Kami benar-benar mengikuti perkembangan pasar.

**KETUA RAPAT:**

Atau begini saja, saran saya, setiap BUMN itu diwajibkan untuk mengeluarkan dana CSR ia kan. Dana CSR nya nanti untuk petani bawang putih. Kan bisa begitu ya.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Bulog tidak ada profit Pak. Karena tidak ada profit tidak ada CSR teknisnya.

**KETUA RAPAT:**

Bulog itu tidak ada profit. Bulog itu BUMN. Seluruh BUMN itu bu, diwajibkan untuk mengeluarkan dana CSR. Kalau Bulog bukan BUMN tidak mengeluarkan dana CSR. Bulog itu BUMN. Pak Oka bagaimana.

**KEMENDAG (OKA):**

Mohon ijin Pak.

Secara prinsip saya sepakat, tapi disini yang diperlukan adalah bagaimana mekanismenya kita melakukan kontrol, bawah Bulog itu melakukan operasi dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

**KETUA RAPAT:**

Berarti point lagi ya.

**KEMENDAG (PAK OKA):**

Bahwa itu harus beroperasi dalam rangka, contohnya ini tadi Pak Sudin masuk akal. Sekarang pada posisi stabil misalnya. Apakah itu tetap melakukan importasi dan melakukan itu. Hanya mau melengkapi saja disini Pak.

Demikian Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ia soalnya harga itu bawang putih stabil tidak stabil, kadang-kadang begitu sama seperti cabe rawit.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Ketua, kalau harga mau stabil itu paling gampang kok. Kewajiban tanam secepatnya, RIPH secepatnya, SPI keluarkan secepatnya sebanyak-banyaknya. Aman kalau pasokannya banyak. Itu saja kok. Justeru ini, ini sepertinya ada yang bermain, tatap saja kalau bisa jangan jangan cepat-cepat, agak lama sedikit, kuotanya tidak terlalu banyak. Coba kalau kuotanya banyak keluarkan, pasti harganya murah, hukum dagang berlaku ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ia-ia. Seharusnya yang point 4 cukup ya, ini ya. Pokoknya ini intinya bahwa ada komitmen dari Bulog ya ini sebagai catatan untuk memperhatikan petani bawang putih ya.  
Anggota sudah ya, oke ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kalau diam berarti oke.

5. Komisi IV DPR-RI memintan Pemerintah untuk menindak tegas para pelaku usaha pangan yang terbukti melanggar kelancaran distribusi dan keamanan pangan serta yang melakukan penimbunan pangan, sehingga harga pangan menjadi tinggi.

Ini Undang-Undang ini, sebenarnya jangan ditulis tidak jadi masalah ini, karena kewajiban dari Undang-Undang ia ini. Apa perlu diingatkan kembali dengan ditulis, menegaskan kembali.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ini dalam rangka RPD kita yang lalu juga ada.

**KETUA RAPAT:**

Ia memang. Memang dalam RDP yang lalu juga ada, mau kita bicarakan sekali ini. Karena kemarin waktu RPD itu tidak bersama Kemendag. Nah sekarang dengan keluarga Kemendag sekarang, makanya perlu ditampilkan lagi.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Mungkin harga menjadi tinggi, tapi harga sehingga harga melonjak.

**KETUA RAPAT:**

Melonjak saja ya. Sehingga harga pangan melonjak. Kalau melonjak itu pasti ke atas bu ya, bukan kebawah. Kalau kebawah anjlok, kalau keatas melonjak.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Pak Pimpinan, mungkin sehingga mengganggu kestabilan harga pangan.

**KETUA RAPAT:**

Atau naik saja. Sehingga harga naik. Itu saja. Naik saja ya. Pakai apa naiknya ini. Pemerintah?

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Saya rasa memang lebih bagus sehingga tidak mengganggu stabilitas harga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke, bagaimana bu bahasanya bu.

**DIREKTUR PERUM BULOG (JUDITH):**

Tidak mengganggu kestabilan harga pangan.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Karena Pak ketua, kadang-kadang ada kemungkinan pedagang atau pelaku usaha justeru menjatuhkan harga dari petani.

**KETUA RAPAT:**

Nanti kalau naiknya ada bertanya, naiknya pakai apa. Harga pesawat juga tinggi sekarang menjelang lebaran.  
Pemerintah oke ya.

**KEPALA BKP KEMANTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Ketua.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Anggota?

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, saya minta ditambahkan satu lagi.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ini dulu sebelum tambahan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Ia sudah kalau pemerintah sudah setuju tidak apa-apa.

**KETUA RAPAT:**

Setuju dulu. Oke-oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kalau ada tambahan lagi, silakan.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Jadi kalau bisa nomor 6 itu dibuat juga, bagaimana si kita menciptakan pedagang kecil, importir kecil, dimasukan kesimpulannya, misalnya yang diutamakan dibawah 10 ribu atau 8 ribu atau 7 ribu atau 6 ribu dibuatkan kesimpulannya. Jadi pedagang kecil juga menikmati untung, jangan yang kaya semangkin kaya Pak, jangan importir yang besar diutamakan. Coba masukan Toro itu, cepat.

**KETUA RAPAT:**

Coba Pak Sudin bagaimana bahasanya ini. Apa ininya pemerintah memberikan perhatian terhadap para importir kecil, apa. Memang nomenklaturnya memang ada importir kecil importir besar tidak ada. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Memberikan perhatian khusus terhadap importir.

**KETUA RAPAT:**

Jadi ini importir bawang putih ya.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Ada kekhawatiran kami Pak ketua, kalau ini kita tulis, yang besar nanti akan memecahkan diri menjadi kecil-kecil Pak. Sudah itu mengontrolnya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Atau dibuat saja, importir dibawah sekian ton.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Yang besar tadi akan memecahkan diri menjadi kecil-kecil Pak Sudin.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Sekarang kita pikirkan juga yang permen kecil Pak, jangan yang besar saja Pak, kalau yang besar sudah kaya Pak. Redaksinya Pak ketua yang mengaturnya.

**KETUA RAPAT:**

Artinya ini pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan yang adil itu, terhadap seluruh importir itu dalam berusaha. Intinya begitu ya. Memberikan perhatian yang adil terhadap seluruh importir dalam melakukan usahanya. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memeberikan perhatian yang adil terhadap seluruh importir khususnya bawang putih. Itu saja ya. Jadi pengertian adil ini, nanti tergantung kepada para pelaku usaha itu, baik yang besar atau kecil, kalau dia mau tumbuh, maka pemerintah wajib memberikan rasa keadilan, memberikan fasilitas dalam rangka apa, menciptakan persaingan pasar sempurna kalau bisa. Semangkin banyak pemainnya, maka pemerintah menjaga agar rasa keadilan itu siapaun yang masuk akan difasilitasi. Intinya begitu Pak Sudin ya.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Tapi apa tidak pengertiannya kalau kecil itu seberapa, kalau besar itu seberapa, kenapa tidak dicantumkan yang kecil itu misalnya 1000 ton atau 2 ribu ton atau 5 ribu ton atau 6 ribu ton.

**KETUA RAPAT:**

Karena definisi kecil-besar tidak ada. Nomenklaturnya importir kecil importir besar ada tidak nomenklatur menurut peraturan kementerian pertanian atau kementerian perdagangan definisi nomenklaturnya apa. Tidak ada ya. Saya rasa yang lebi normatif itu, pemerintah memberikan rasa keadilan kepada seluruh pelaku usaha. Saya rasa itu lebih normatif Pak Sudin.

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Sekarang begini Ketua. Kalau yang besar sampai monopoli kan kita tahu. Jaman dulu importir bawang putih tunggal, ia kan. Bapak harus ingat jaman Orde Baru itu bawang putih tunggal, salin grup, baru dipecahkan dibawahnya, dibawahnya ada siapa, ada Sungai Budi sebagai distributor. Nanti dibagi lagi provinsi. Jadi kita jangan menganak emaskan importir besar.

Itu saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Betul. Jadi ini konsekuensi hukum dari bahasa kada adil itu berat buat pemerintah itu. Itu berat sekali Pak Sudin, konsekuensi hukum dari adil. Kalau pemerintah tidak adil, itu artinya akan ada perlakuan yang melanggar hukum sebenarnya, kepada siapapun pelaku usaha yang akan berusaha untuk melakukan importasi bawang putih sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Saya rasa sudah cukuplah ya Pak Sudin ya.

Oke, pemerintah.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Setuju Pak ketua.

**KETUA RAPAT:**

Anggota?  
Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kita sudah rapat berapa jam ya,

Demikianlah Bapak-Ibu semuanya beserta rapat, seluruhnya sudah kita selesaikan termasuk juga kesimpulan rapat, sebelum rapat ini ditutup, kami persilakan kepada pemerintah untuk memberikan kata akhir dalam rapat ini.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Baik terima kasih Ketua.

Tentu yang pertama kami sampaikan penghargaan dan apresiasi atas saran dan masukan kepada Pemerintah, kepada Kementerian Pertanian, kepada Kementerian Perdagangan dan Bulog. Semoga semua saran bisa kita tindaklanjuti dan tentunya yang paling terakhir, kami atas nama pemerintah juga ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin. Jadi hari raya idul fitrinya. Semoga juga amal ibadah puasa kita selama bulan ramahdah diterima oleh Allah SWT.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warrahamtullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan, tolong nanti diingatkan juga, apabila terjadi gejolak harga yang tidak wajar, kita panggil lagi setelah lebaran Bapak-bapak, Ibu-ibu di depan ini. Kita minta pertanggung jawabannya dong.

**KEPALA BKP KEMENTAN (AGUNG HENDRIADI):**

Siap, siap Pak, siap.

**KETUA RAPAT:**

Siap. Pak Sudin juga harus hadir, kalau Pak Sudin tidak hadir, rapatnya tidak jadi nanti.

Terima kasih Bapak-Ibu semuanya, Pemerintah dan Anggota, ini adalah merupakan rapat yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena menghasilkan keputusan yang sangat luar biasa, semoga dapat memberikan manfaat buat kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita tutup bersama-sama dengan bacaan Hamdallah.

*Alhamdulillahirrobilalamiin*

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah  
Assalamualaikum Warrahamtullahi Wabarakatuh.*

Shalom, Om santi, santi om.  
Namo Buddhaya.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30.**

Jakarta, 29 Mei 2019

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris Rapat

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001